



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Quiescit

PEBS FEB UI

p-ISSN 2961-7170



INDONESIA SHARIA ECONOMIC OUTLOOK 2023

**Resilience and Adaptability of Indonesian
Islamic Economy Amidst
Uncertainties.**

Volume 8, 2023



***Resilience and Adaptability of Indonesian
Islamic Economy Amidst
Uncertainties***

Volume 8, 2023



ISEO 2023: Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties

Volume 8, 2023

SUSUNAN TIM PENULIS

Editor Rahmatina A. Kasri, Ph.D.

Koordinator Azizon, M.Sc.

Asisten Koordinator Adela Natasya, S.E.

Penulis Rahmatina A. Kasri, Ph.D.
Nur Kholis, M.S.E.
Tika Arundina, Ph.D.
Wahyu Jatmiko, Ph.D.
Fauziah Rizki Yuniarti, M.Sc.
Kenny Devita, M.Ec.
Azizon, M.Sc.
Dr. Banu Muhammad Haidlir
Adela Miranti Yuniar, S.E.



Asisten Penulis Adela Natasya, S.E.
Afidah Nur Aslamah, S.Pd.
Ali Kifayatullah
Emir Reza Pahlawan

Desain dan Tata Letak Rifqy Amin, A.Md.I.Kom
Allizha Puti Monarqi, A.Md.I.Kom

METODE PENELITIAN

Penulisan laporan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* dilakukan dengan menggunakan metode bauran (*mix method*), yang merupakan bauran atau perpaduan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode kuantitatif, analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang berasal beberapa laporan dan statistik resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan berbagai sumber lainnya. Sementara itu, dengan metode kualitatif, analisis dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dimana dan fokus grup terpumpun bersama para pakar. Data yang diperoleh kemudian ditriangulasikan untuk memperoleh hasil dan rekomendasi sebagaimana tersaji dalam laporan ini.

Sambutan Dekan FEB UI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, krisis geopolitik global dan krisis energi yang terjadi di awal 2022, serta berbagai ketidakpastian lainnya memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi global dan ekonomi Indonesia. Berbagai ketidakpastian ini tentunya akan menjadi ujian untuk melihat ketangguhan ekonomi dan keuangan syariah baik secara global maupun di Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat jika kemudian *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* mengangkat tema **Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties**, sebuah tema yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini, yang akan dibahas komprehensif dan sistematis dalam laporan ini.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI yang telah menyusun laporan ini dengan sangat baik. Saya juga sangat mengapresiasi upaya PEBS FEB UI yang secara konsisten telah menerbitkan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO)* sejak tahun 2010. Selain itu, selaras dengan tujuan FEB UI untuk menjadi pusat studi ekonomi dan bisnis termuka dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, peluncuran ISEO 2023 ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kontribusi nyata peran PEBS FEB UI di masyarakat. Pada tahun-tahun mendatang, FEB UI akan menuju **the next level of excellence** salah satunya melalui peningkatan keterlibatan

masyarakat dan industri, antara lain melalui *revitalisasi dan refocusing* Lembaga/Unit Kerja Khusus seperti PEBS FEB UI dengan berbagai produk unggulannya. Hal ini akan semakin meningkatkan societal impact dan meneguhkan peran FEB UI dalam mempengaruhi kebijakan publik yang menjadi keunggulan FEB UI yang telah memperoleh *double crown accreditation* oleh AACSB dan AMBA.

Semoga *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* dapat memberikan informasi, wawasan dan manfaat yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan secara global.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Teguh Dartanto, Ph.D.

Dekan FEB UI

Sambutan Kepala PEBS FEB UI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, khususnya kami di PEBS FEB UI, sehingga kami dapat menyelesaikan serta menerbitkan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023*. Sholawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023 mengusung tema besar *Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties*. Tema ini diambil karena merefleksikan perkembangan dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sepanjang tahun 2022, yang terbukti resilien/tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak sosio ekonomi dan ketidakpastian yang terjadi. Tema ini juga dianggap tepat karena ke depan diproyeksikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah Indonesia akan tetap mampu bertahan dan bahkan bisa tumbuh lebih baik lagi sejalan dengan dukungan yang semakin besar terhadap sektor ini.

Secara lebih khusus, *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* ini memberikan gambaran perkembangan dan kondisi terkini ekonomi dan keuangan syariah di tahun 2022 serta peluang, tantangan dan ekspektasi di tahun 2023. Laporan ini juga memberikan beberapa usulan strategi dan rekomendasi kebijakan, yang diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah dalam membuat kebijakan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama segenap tim penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023*. Kami juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini.

Semoga *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* dapat memberikan kebermanfaatan bagi para pembacanya serta berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. InshaAllah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Rahmatina A. Kasri, Ph.D.

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia

ISEO 2023: Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties

Volume 8, 2023

Daftar Isi

SUSUNAN PENULIS	3	Klaster Keuangan Sosial Islam	
SAMBUTAN DEKAN FEB UI	4	Kondisi Terkini	45
SAMBUTAN KEPALA PEBS FEB UI	4	Peluang	48
DAFTAR ISI	6	Tantangan	48
DAFTAR GAMBAR	7	Ekspektasi ke depan	48
DAFTAR TABEL	7	Rekomendasi	49
RINGKASAN EKSEKUTIF	8	Klaster Industri Halal	
PERKEMBANGAN & PROSPEK EKONOMI		Kondisi Terkini	52
KEUANGAN SYARIAH INDONESIA ..	10	Peluang	56
Klaster Keuangan Komersil	19	Tantangan	57
Perbankan Syariah	20	Ekspektasi ke depan	59
Kondisi Terkini	20	Rekomendasi	59
Peluang	23	Klaster Frontier	
Tantangan	24	Kondisi Terkini	61
Ekspektasi ke depan	26	Peluang	66
Rekomendasi	27	Tantangan	66
Pasar Modal		Ekspektasi ke depan	66
Kondisi Terkini	30	Rekomendasi	67
Peluang	34	DAFTAR REFERENSI	
Tantangan	34	TENTANG PEBS FEB UI	
Ekspektasi ke depan	34		
Rekomendasi	35		
Industri Keuangan Non-Bank Syariah			
Kondisi Terkini	36		
Peluang	41		
Tantangan	41		
Ekspektasi ke depan	42		
Rekomendasi	42		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Real dan Proyeksi GDP Amerika Serikat dan Berbagai Negara di Eropa	11
Gambar 1.2 Purchasing Manager Index Amerika, Cina, dan Jerman	11
Gambar 1.3 Nilai Dolar terhadap Mata Uang Negara Lain	12
Gambar 1.4 Persentase Pertumbuhan PDB Indonesia	12
Gambar 1.5 Trade Balance Indonesia	13
Gambar 1.6 Tingkat Inflasi Indonesia	13
Gambar 1.7 Data Peringkat Indonesia dalam Skor Indikator Ekonomi Syariah Global	13
Gambar 2.1.1 Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Perbankan Syariah Indonesia	20
Gambar 2.1.2 Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Indonesia	20
Gambar 2.1.3 Pertumbuhan Ekuitas BUS, UUS dan BPRS	22
Gambar 2.1.4 ROA Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Bank Syariah (%)	21
Gambar 2.1.5 NPF Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Bank Syariah	24
Gambar 2.1.6 Financing to Deposit Ratio (FDR) berdasarkan Jenis Bank Syariah (%)	22
Gambar 2.1.7 Market Share Perbankan Syariah 2017-2022	23
Gambar 2.1.8 Market Shar dan Komposisi Industri Perbankan Syariah	23
Gambar 2.1.9 Komposisi Akad dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah	25
Gambar 2.1.10 Komposisi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	26
Gambar 2.1.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi	26
Gambar 2.1.12 Sektor Pembiayaan Perbankan Syariah 2022	27
Gambar 2.2.1 Perkembangan Aset Pasar Modal Syariah Periode Januari 2017 – Desember 2022	30
Gambar 2.2.2 Perkembangan Jumlah Saham Syariah Periode 1 2017 – Periode 2 2022	31
Gambar 2.2.3 Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia Periode Desember 2022 (Miliar Rupiah)	31
Gambar 2.2.4 Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum Periode Desember 2018 - 2022	32
Gambar 2.2.5 Nilai Outstanding Sukuk Negara Periode Desember 2015-November 2022	32
Gambar 2.2.6 Perkembangan Jumlah Aset Reksadana Periode Desember 2018-Oktober 2022 (Miliar Rupiah)	33
Gambar 2.2.7 Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Periode Desember 2018-Oktober 2022	33
Gambar 2.2.8 Jenis Reksadana Periode Oktober 2022	34
Gambar 2.3.1 Pertumbuhan Aset IKNB Periode Desember 2018 –2022	36
Gambar 2.3.2 Pertumbuhan Jumlah Pelaku IKNB Periode Desember 2018 – 2022	37
Gambar 2.3.3 Perkembangan Proporsi Aset IKNB Syariah Desember 2019-2022 (Triliun Rupiah)	37
Gambar 2.3.4 Negara dengan Ekosistem Fintech yang Supportif dan Kondusif Tahun 2022	38
Gambar 2.3.5 Perkembangan Aset Fintech Syariah periode Desember 2019 - 2022 (Triliun Rupiah)	38
Gambar 2.3.6 Jumlah Pelaku Fintech Periode Desember 2019 - 2022	38
Gambar 2.3.7 Pertumbuhan Aset Modal Ventura Periode Desember 2018 - 2022	39
Gambar 2.3.8 Jumlah Pelaku Modal Ventura Periode Desember 2018 - 2022	39
Gambar 2.3.9 Portfolio Investasi Dana Haji	40
Gambar 3.1 Pengumpulan ZIS Periode Januari 2022-September 2022	45
Gambar 3.2 Persentase Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf	46
Gambar 3.3 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf, serta Persentase Tanah Wakaf Bersertifikat	46
Gambar 3.4 Akumulasi Wakaf Uang Nasional	47
Gambar 3.5 Total Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah Periode Desember 2021-Agustus 2022 (Miliar Rupiah)	47
Gambar 3.6 Perbandingan Jumlah Pelaku UKM Syariah dan Konvensional	47
Gambar 4.1 PDB Industri Makanan dan Minuman	52
Gambar 4.2 Posisi Sektor Industri Halal Indonesia dalam State of Global Islamic Economy 2022	53
Gambar 4.3 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara di Pintu Masuk Utama, Agustus 2021-Agustus 2022 (ribu kunjungan)	53
Gambar 5.1 Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Periode (Juni 2021 - Juni 2022) Triliun Rupiah	62
Gambar 5.2 Komposisi Investor berdasarkan Kelas Aset di Indonesia Periode Juni 2021 – Juni 2022 (Triliun Rupiah)	63
Gambar 5.3 Tren Metaverse	63
Gambar 5.4 Porsi Responden yang Mengatakan bahwa Organisasi Mereka Telah Mengadopsi AI Setidaknya dalam Satu Fungsi (%)	64
Gambar 5.5 Persentase (%) Responden yang Mengatakan Kemampuan AI yang Tertanam pada Produk atau Proses Bisnis Setidaknya di dalam Satu Fungsi atau Unit Bisnis	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penurunan Komoditas Energi Dunia	12
Tabel 1.2 Indikator Makroekonomi Indonesia	18
Tabel 2.2.1 Jumlah Aset dan Market Share Instrumen Pasar Modal Periode September 2022	30
Tabel 4.1 Posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index 2022 dan Lima Daerah Wisata Ramah Muslim di Indonesia	54
Tabel 4.2 Nilai Ekspor dan Impor Produk Halal Indonesia ke Negara OKI (dalam miliar US Dolar)	54

Ringkasan Eksekutif

Walaupun terjadi berbagai gejolak ekonomi dan ketidakpastian politik global, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2022 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sangat menggembirakan dan mencapai 5,31% (yoy), atau hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berada di angka 3,71% (yoy). Selain itu, inflasi juga terjaga di angka 5,51% (yoy), tingkat pengangguran turun menjadi 5,86%, dan tingkat kemiskinan juga turun menjadi 9,57%. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya belanja domestik pasca pandemi, lonjakan harga komoditas secara global, dan kemampuan

pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik melalui berbagai bauran kebijakan yang dilakukan. Surplus perdagangan yang terjadi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan kredit di semua sektor ekonomi.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia pada tahun 2022, kinerja ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga menunjukkan peningkatan di hampir semua sektor yang mencakup sektor perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah (IKNB) syariah (termasuk keuangan haji), keuangan sosial Islam, dan industri halal. Indonesia mampu mempertahankan posisi ke-4 dalam hal ranking global terkait pengembangan ekonomi syariah dan mampu meningkatkan peringkatnya menjadi peringkat ke-2 dalam *Global Muslim Travel Index*. Kondisi ini didukung oleh semakin menguatnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta membaiknya kinerja di hampir seluruh sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Penguatan ekosistem terlihat antara lain dari semakin banyaknya riset dan inovasi yang dikembangkan, semakin baiknya kuantitas dan kualitas SDM, pemakaian teknologi digital yang semakin berkembang dan jangkauannya yang semakin luas, kesadaran dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang semakin tinggi, semakin baiknya jaminan perlindungan konsumen untuk produk halal dan semakin besarnya dukungan pemerintah termasuk dalam hal regulasi.

Perbaikan kinerja sektoral juga terjadi di hampir semua sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sektor keuangan syariah menunjukkan

peningkatan kinerja dan pangsa pasarnya mencapai 10,69%. Secara lebih spesifik, sektor perbankan syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari peningkatan pangsa pasar perbankan syariah dari 6,75% menjadi 7,09%, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,93%, dan pertumbuhan aset yang mencapai 9,42%. Sektor IKNB syariah juga menunjukkan performa yang baik, di mana pangsa pasarnya meningkat dari 4,25% menjadi 4,73%. Meskipun jumlah pelakunya cenderung stagnan, namun pertumbuhan asetnya meningkat 21% dari Rp121 triliun menjadi Rp146 triliun dengan proporsi aset yang didominasi oleh lembaga jasa keuangan syariah. Pada sektor pasar modal syariah, pangsa pasar juga terus mengalami tren kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 18,27%. Aset pasar modal syariah juga tumbuh sekitar 16% dibandingkan tahun lalu. Sementara pada sektor keuangan haji, BPKH mencatatkan kinerja likuiditas dan solvabilitas yang baik, walaupun *return* investasi mengalami sedikit penurunan dari 6,88% menjadi 6,28%.

Pada sektor industri halal, meskipun nilai impornya masih lebih besar dibandingkan nilai ekspornya, industri halal mencatatkan pertumbuhan yang baik pada tahun 2022. Nilai pasar pengeluaran konsumen muslim di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun 2020 ke tahun 2022. Potensi rata-rata nilai ekspor produk halal ke negara Islam (OKI D-8) diperkirakan mencapai US\$233,12 juta. Sehingga, secara global, makanan dan minuman halal menempati peringkat ke-2, fesyen modes ada di peringkat ke-3, sementara farmasi dan kosmetik halal ada di peringkat ke-9. Dari sisi kelembagaan, sampai dengan periode Desember 2022, terdapat 31 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 156 Lembaga

Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan 20.160 Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pada periode yang sama, terdapat total 106.670 permohonan sertifikasi halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dan 35.930 diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal. Pada sektor keuangan sosial Islam, pertumbuhan sepanjang 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana nilai ZIS meningkat 21% menjadi Rp 20 triliun rupiah, nilai wakaf uang meningkat sebesar 107% hingga mencapai Rp557,33 miliar, dan total aset keuangan mikro syariah naik sekitar Rp53 miliar rupiah menjadi Rp1.436,34 miliar. Selain itu, perkembangan *blockchain*, *metaverse*, maupun *cryptocurrency* mulai menjadi perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah. Bahkan, Bank Indonesia saat ini sudah mengembangkan inovasi *virtual currency* (VC) di Indonesia.

Dalam mendukung kinerja ekonomi dan keuangan syariah tersebut, terdapat beberapa peluang yang perlu dioptimalkan di tahun 2023, antara lain membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat (termasuk pertumbuhan kelas menengah yang semakin tinggi) seiring dengan meningkatnya atau kembali normalnya mobilitas masyarakat; perkembangan digitalisasi (*digital connectivity*) yang semakin baik; jumlah penduduk Muslim yang besar dengan tingkat konsumsi yang relatif stabil; peningkatan kesadaran beragama; karakteristik penduduk yang dermawan, adaptif, dan inovatif; adanya dukungan pemerintah pusat termasuk dalam hal regulasi; serta meningkatnya perdagangan internasional termasuk dengan negara OKI.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu literasi yang masih rendah, yang juga menunjukkan kuatnya *mindset* pada konsep/praktek ekonomi konvensional; kuantitas dan kualitas/kapasitas SDM yang kurang merata antar sektor dan daerah; masih lemahnya riset dan pengembangan (R&D) dibandingkan potensinya; tata kelola yang masih perlu diperkuat, terutama untuk IKNB syariah dan keuangan sosial Islam; masih terdapatnya regulasi yang harus diharmonisasikan; keterbatasan infrastruktur

(termasuk infrastruktur digital); serta masih lemahnya dukungan pemerintah daerah. Kedepannya, sejalan dengan berbagai peluang yang ada, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023 diproyeksikan akan terus mengalami penguatan. Keuangan syariah diprediksi tumbuh sebesar 13–15%. Secara khusus, pertumbuhan DPK perbankan syariah diproyeksikan akan mencapai 7–9% dan pertumbuhan kredit berada pada kisaran 11–13%. Sektor IKNB Syariah juga diekspektasikan akan tumbuh, walaupun besarnya akan bervariasi antar sub-sektor dimana investor diperkirakan akan melakukan diversifikasi dengan menitikberatkan investasi pada reksadana, saham syariah, serta sukuk. Sektor dana haji diperkirakan juga akan membaik, terutama dari segi pengelolaan dan tata kelola lembaga. Selanjutnya, sektor ZISWAF diperkirakan akan tumbuh sangat pesat dengan pengumpulan mencapai 24–30 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan sektor keuangan mikro syariah relatif stagnan dan diperkirakan ada dalam kisaran 4–5%. Di tahun 2023, industri halal diyakini dapat tumbuh lebih baik terutama untuk sektor makanan dan minuman halal serta pariwisata halal dan fesyen modes. Tidak hanya itu, ke depannya diperkirakan perkembangan teknologi *blockchain* akan bisa semakin menyentuh dan bermanfaat bagi industri ekonomi dan keuangan dan syariah agar lebih efisien operasionalnya dan inklusif cakupannya.

Untuk bisa mencapai pertumbuhan tersebut, beberapa rekomendasi dari laporan ini adalah penguatan sinergi dan kolaborasi, baik dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari hulu ke hilir; penguatan dan harmonisasi peraturan, perizinan, dan pengawasan; penguatan infrastruktur, khususnya infrastruktur digital untuk mengoptimalkan penghimpunan, penyaluran dan pemasaran produk ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dan luar negeri; penguatan regulasi dan tata kelola; peningkatan kualitas dan kapasitas SDM; peningkatan inovasi dan R&D terkait bahan baku, produk, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (termasuk integrasi produk dari beberapa sektor ekonomi dan keuangan syariah); dan penguatan kerjasama internasional.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

PEBS FEB UI



Perkembangan dan Prospek Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia



2023

10

Perkembangan dan Prospek Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia

Kondisi Ekonomi Global Sepanjang 2022

Sepanjang tahun 2022, ekonomi global ditandai dengan penurunan pertumbuhan di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, sebagai salah satu dampak dari masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Gambar 1.1 Data Real dan Proyeksi GDP Amerika Serikat dan Berbagai Negara di Eropa

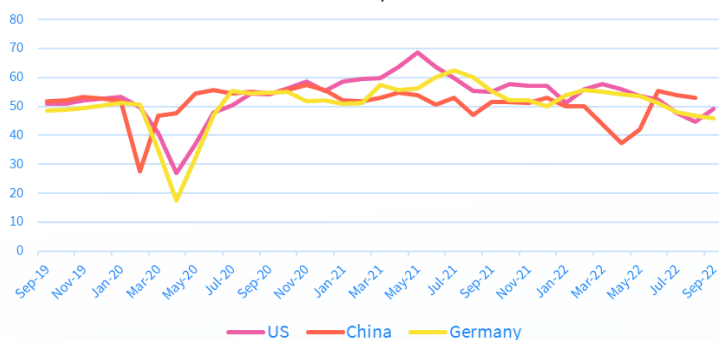
(real GDP, annual percent change)	2021	2022	2023
World Output	6.1	3.2	2.9
Advanced Economies	5.2	2.5	1.4
United States	5.7	2.3	1.0
Euro Area	5.4	2.6	1.2
Germany	2.9	1.2	0.8
France	6.8	2.3	1.0
Italy	6.6	3.0	0.7
Spain	5.1	4.0	2.0
Japan	1.7	1.7	1.7
United Kingdom	7.4	3.2	0.5
Canada	4.5	3.4	1.8
Other Advanced Economies	5.1	2.9	2.7
Emerging Market and Developing Economies	6.8	3.6	3.9
Emerging and Developing Asia	7.3	4.6	5.0
China	8.1	3.3	4.6
India	8.7	7.4	6.1
ASEAN-5	3.4	5.3	5.1

Sumber: diolah dari data World Bank (2022)

Pelemahan ekonomi global disertai dengan naiknya harga komoditas menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan ekonomi utama Eropa, sehingga memicu kondisi keuangan yang lebih ketat. Hal ini tercermin dari nilai PPM di berbagai negara besar di dunia.

Ketegangan geopolitik mendorong peningkatan harga komoditas yang selanjutnya meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi. Perang Rusia-Ukraina yang menyeret negara-negara Barat dapat menghilangkan sekitar 3 juta barel per hari ekspor minyak Rusia ke pasar global, sehingga pasar minyak dunia kekurangan 3 juta barel per hari sebagai imbas konflik ini. Masalahnya lagi adalah diperkirakan tidak akan ada lagi negara yang mampu untuk mengimbangi produksi dan pasokan minyak Rusia. Bahkan setelah rilis cadangan minyak darurat, produksi minyak yang lebih tinggi dari OPEC hingga potensi pencabutan sanksi terhadap Iran dan Venezuela, pasar minyak dunia tetap kekurangan pondasi. Dunia akan dipaksa untuk menggunakan lebih sedikit minyak, hingga pada gilirannya dapat merusak ekonomi, apalagi jika itu berarti mengurangi konsumsi transportasi hingga penurunan jumlah minyak untuk plastik.

Gambar 1.2 Purchasing Manager Index Amerika, Cina, dan Jerman



Sumber: diolah dari data Institute for Supply Management Report (2022)

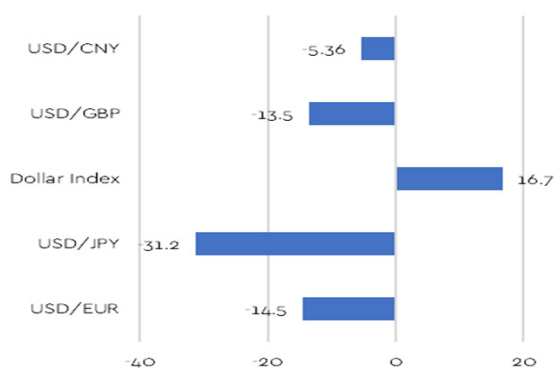
Tabel 1.1 Data Penurunan Komoditas Energi Dunia

Commodity	26-Sep-22	31-Dec-21	%YOY	%YTD
Gold	1,622.36	1,829.20	-7.30	-11.31
Brent Oil	84.06	77.78	5.70	8.07
Natural Gas	6.90	3.73	20.93	84.99
Coal	438.00	169.60	113.92	158.25
Nickel	22,064.00	20,873.50	16.38	5.70
CPO	3,481.00	5,159.00	-24.80	-32.53
Wheat	858.00	770.75	18.80	11.32

Sumber: diolah dari data Bloomberg (2022)

Fenomena *Strong Dollar* pun terjadi seiring dengan kebijakan *Hawkish The Fed* (kebijakan moneter yang cenderung kontraktif seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi neraca bank sentral) dalam merespon inflasi, sehingga menyebabkan pelemahan nilai mata uang di berbagai negara di dunia.

Gambar 1.3 Nilai Dolar terhadap Mata Uang Negara Lain

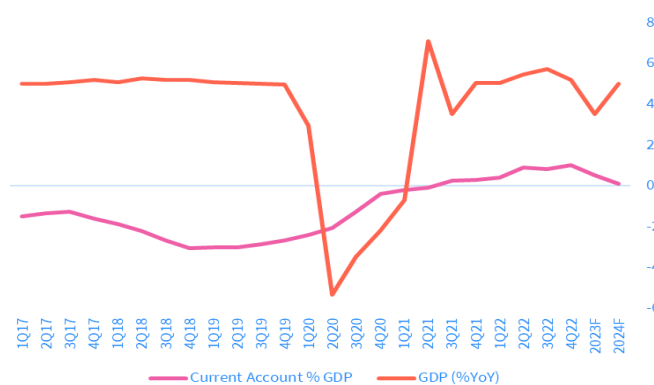


Sumber: diolah dari data Bloomberg (2022)

Tantangan Ekonomi Global dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia

Terlepas dari prospek ekonomi global yang diprediksi tetap suram, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tumbuh 5,01% YoY karena lonjakan harga komoditas yang menguntungkan kinerja eksternal dan kuatnya belanja domestik.

Gambar 1.4 Persentase Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik (2022)

Surplus neraca perdagangan juga memberikan dampak peningkatan pada pertumbuhan kredit di semua sektor. Namun, meski masih meningkat, nilai perdagangan global tetap berlanjut melambat. Jadi, sementara tingkat pertumbuhannya mengesankan (dengan nilai perdagangan global sekitar 30 persen lebih tinggi pada Q1-2022 daripada tingkat pra-krisis COVID-19), kontrasnya adalah bahwa volume perdagangan meningkat ke tingkat yang jauh lebih rendah selama periode yang sama (sekitar 6 persen). Perbedaan antara nilai dan volume ini disebabkan oleh signifikannya kenaikan harga komoditas, khususnya energi dan produk pangan, dan inflasi umum. Ini adalah situasi yang cukup nyaman bagi negara-negara kaya komoditas seperti Indonesia. Namun, orang dapat berargumen bahwa – dalam

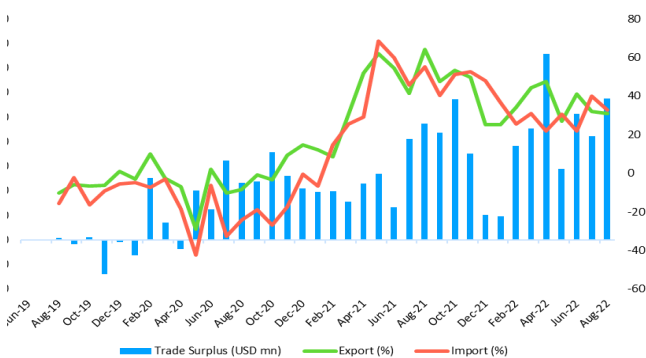
hal perdagangan – ekonomi global situasi saat ini terlihat lebih baik di atas kertas daripada kenyataannya. Selain itu, ada daftar faktor yang menyebabkan keraguan lebih lanjut atas kesehatan ekonomi global (dan karenanya juga menimbulkan keraguan pada permintaan untuk perdagangan internasional dalam periode ke depan) pada paruh kedua tahun 2022. Tingginya permintaan terhadap komoditas menjadi booster bagi kemampuan spending kelompok pendapatan menengah keatas.

Dari sisi inflasi, tingkat inflasi masih berada diatas target inflasi BI di 2022 yaitu $\pm 1\%$

Kinerja Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

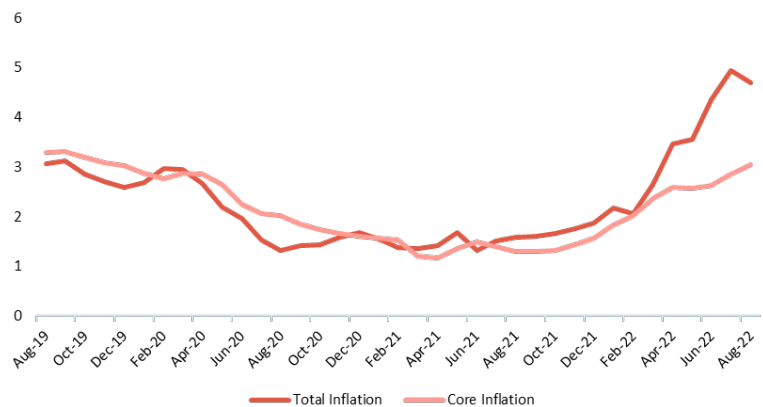
Di tahun 2022, berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economy Report 2021/2022*, Indonesia mampu mempertahankan posisi ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Namun demikian, posisi untuk berbagai sub-sektor ekonomi syariah bervariasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk sektor pariwisata halal, berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index*, Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-2 pada tahun 2022. Sementara itu, Indonesia dilaporkan menempati peringkat ketiga dalam *Islamic Finance Development Report 2022* dan *Global Islamic Finance Report 2022*.

Gambar 1.5 Trade Balance Indonesia



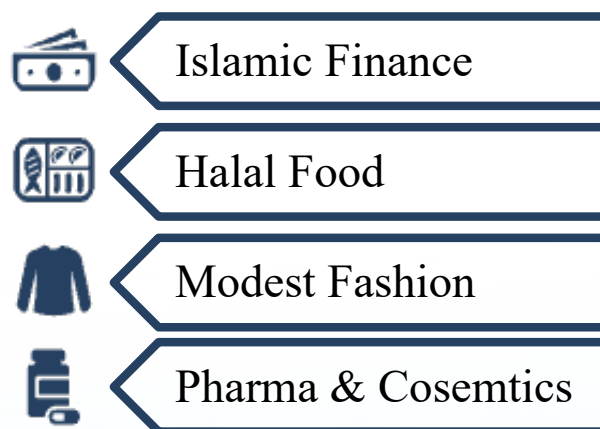
Sumber: diolah dari data Indonesia Investments (2022)

Gambar 1.6 Tingkat Inflasi Indonesia



Sumber: diolah dari data Bank Indonesia (2022)

Gambar 1.7 Data Peringkat Indonesia dalam Skor Indikator Ekonomi Syariah Global



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2021/2022 (2022)

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 dan Dampaknya terhadap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Di level institusi, berbagai lembaga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berhasil meraih penghargaan di level internasional. Misalnya dalam *Global Islamic Finance Award*, beberapa lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, dan ALAMI fintech syariah memperoleh berbagai penghargaan. BSI bahkan meraih penghargaan bergengsi pada *Global Islamic Finance Awards (GIFA)* yaitu *Market Leadership Award* (kategori *Islamic Banking*) 2021. BSI juga mendapatkan penghargaan sebagai *The Strongest Islamic Retail Bank* di Indonesia pada ajang *the 8th Islamic Retail Banking Awards (IRBA) 2022* berdasarkan penilaian terhadap 130 bank syariah di seluruh dunia. Tidak hanya itu, beberapa lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memperoleh penghargaan atas dukungannya dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Penguatan kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia secara global didukung oleh semakin menguatnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta membaiknya kinerja di hampir seluruh sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Secara khusus, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mencakup beberapa aspek. Di antara aspek yang penting dan patut mendapatkan perhatian khusus adalah aspek riset dan sumber daya manusia (SDM), literasi, regulasi, teknologi digital, dan jaminan perlindungan konsumen. Perkembangannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Riset dan Pengembangan SDM

Sepanjang tahun 2022, dilakukan beberapa kegiatan untuk mengembangkan riset terkait ekonomi keuangan syariah. Kegiatan tersebut antara lain *Halal Tech Expo and Showcasing 2022*, pembentukan konsoridium

riset halal prioritas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembangan teknologi produk halal berbasis maritim nasional, pendampingan teknologi 38 UMKM oleh BRIN dan penyusunan rencana aksi 2022 – 2024 dengan pendanaan skema RIIM-BRIN.

Perkembangan riset dan SDM sangat bergantung kepada perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM berkualitas untuk ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh KNEKS pada tahun 2021, jumlah penyelenggara program studi (Prodi) S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah sebanyak 858 program studi. Prodi ini memang memiliki berbagai macam nomenklatur seperti Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, Akuntansi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan beberapa nomenklatur lainnya. Sektor riset dan pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Sektor ini dinilai menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sehingga beberapa upaya perbaikan terus dilakukan.

Pertama, terkait kolaborasi kajian sinkronisasi industri halal menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), kebutuhan SDM dirasa masih besar dan perlu diperkuat. Hal ini dinilai penting dalam rangka proses percepatan industrialisasi produk halal di Indonesia. Sejauh ini, tercatat sudah ada tiga Kawasan Industri Halal (KIH) yakni Halal Industrial Park Sidoarjo, Modern Halal Valley Cikande, dan Bintang Inti Halal Hub. Eksistensi KIH ini diharapkan dapat menarik investor dan tenants, meningkatkan keberlanjutan usaha melalui UMKM, serta menjadikan KIH sebagai hub bahan baku halal yang dapat mendukung rantai pasok halal global. Dalam mendukung hal ini, tentunya diperlukan SDM dan riset mendalam terkait bagaimana merealisasikan potensi pengembangan KIH sehingga tidak terbatas hanya sebagai kawasan industri saja, melainkan juga sebagai bentuk kawasan

ekonomi strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kedua, percepatan sertifikasi profesi terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya SDM ekonomi dan keuangan syariah yang unggul dan berkualitas. Persoalan ini masih hangat diperbincangkan mengingat masih adanya isu ketidaksesuaian kebutuhan akan SDM ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Walaupun, setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 40.000 lulusan dari program studi ekonomi dan keuangan syariah, namun 90% SDM yang bekerja di sektor tersebut bukan berasal dari lulusan program studi ekonomi dan keuangan syariah. Melihat hal ini, tentunya sangat diperlukan percepatan proses sertifikasi pada masing-masing sektor industri ekonomi dan keuangan syariah.

Ketiga, sinergi dan penyelarasan kurikulum ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya mendukung program kerja strategis terkait peningkatan kualitas SDM ekonomi syariah di Indonesia. Upaya penyelarasan kurikulum ini juga perlu dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia sebagai upaya dalam memberikan peluang mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dengan adanya penyelarasan kurikulum dengan program MBKM, tentunya diharapkan dapat mendorong link and match antara kebutuhan industri dan dapat meningkatkan kualitas SDM ekonomi syariah.

Literasi

Literasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini, terjadi peningkatan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah, di mana indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia meningkat dari 20,1% pada tahun 2021 menjadi 23,3% pada tahun 2022 (Bank Indonesia, 2022), kemudian indeks literasi keuangan syariah di Indonesia juga meningkat dari 8,93% di tahun 2019 menjadi 9,14 pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Peningkatan indeks literasi ekonomi dan

keuangan syariah didukung oleh semakin banyaknya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari komunitas keagamaan dan ekonomi syariah (seperti Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam), institusi pendidikan, hingga lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu kegiatan literasi ekonomi syariah terbesar yang dilakukan di Indonesia adalah kegiatan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan ISEF merupakan acara tahunan terbesar di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terdiri dari kegiatan *Opening Ceremony, Sharia Forum* (rangkaian seminar, konferensi dan forum internasional dan nasional), dan *Sharia Fair* (rangkaian pameran, talk show, workshop, pagelaran budaya & fashion show, tabligh akbar, lomba, dan business linkage) yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, jumlah peserta kegiatan ISEF mencapai 566.181 orang, 950 pelaku usaha, dan total 4.553 peserta dari 4 kompetisi yang diselenggarakan tahun ini. Selain itu, juga terdapat 106.355 pengunjung dari 92 negara yang mengakses website ISEF 2022 yang dihitung mulai 1 September–9 Oktober 2022. Adapun nilai transaksi yang tercatat selama kegiatan ISEF tahun 2022 adalah senilai Rp27,6 triliun yang mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi antar pelaku usaha, transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, dan transaksi pameran.

Selain itu, berbagai asosiasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi. Sebagai contoh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki

program edukasi ekonomi dan keuangan syariah yang dikemas dalam bentuk siaran radio (*talk show on-air*) yang diselenggarakan oleh MES bekerja sama dengan Smart FM. Selain itu, juga terdapat kegiatan edukasi dan sosialisasi lainnya seperti berbagai workshop dan roadshow seputar ekonomi dan keuangan syariah, webinar series, podcast ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) juga melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa, seperti seminar, buletin riset ekonomi dan keuangan syariah, opini dan siaran pers terkait ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai lembaga riset dan edukasi di Universitas juga melakukan kegiatan serupa untuk mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Regulasi

Dalam upaya sinergi antara peran pemerintah dan kebutuhan industri, telah terjadi beberapa perkembangan penting dan peluncuran beberapa regulasi yang berpotensi menjadi kunci perubahan (*game changer*) ekonomi syariah di Indonesia. Dipahami bahwa regulasi yang kuat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Perubahan yang terjadi antara lain:

Pertama, peluncuran UU No. 4 tahun 2023 Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) pada 15 Desember 2022 yang memperkuat UU Perbankan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut UU No 21/2008, UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan spin-off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan undang-undang. Dengan kata lain, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum tahun 2023 berakhir. Akan tetapi, dengan UU P2SK yang juga dikenal dengan Omnibus Law sektor keuangan ini, aturan ini direvisi sehingga kewajiban transformasi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) nantinya akan ditetapkan oleh OJK.

Kedua, pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai daerah di Indonesia. Pendirian KDEKS melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah dikeluarkan di beberapa daerah di Indonesia merupakan upaya penting untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia dan mendorong pembentukan kawasan Industri Halal. Saat ini, terdapat sekitar 8 KDEKS di seluruh Indonesia antara lain di Sumatera Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Ketiga, peluncuran Kawasan Industri Halal (KIH) yang diharapkan bisa mempercepat pengembangan dan pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Hingga akhir 2022, terdapat tiga KIH di Indonesia, yaitu KIH Modern Halal Valley di Cikande Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo Jawa Timur dan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau.

Keempat, penguatan kerangka perdagangan produk halal dengan pembuatan hs code. Klasifikasi Produk Halal ke dalam HS (*Harmonized System*) Code dalam perdagangan internasional oleh Dirjen Bea dan Cukai diharapkan bisa memudahkan identifikasi dalam neraca perdagangan, sehingga memberikan insentif untuk meningkatkan ekspor produk halal dan mempermudah pengukuran kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelima, pengusulan RUU Ekonomi Syariah menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2023. Perjuangan panjang RUU Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi payung atas undang-undang bernafaskan Syariah yang sudah dikeluarkan, seperti UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat dan UU Jaminan Produk Halal.

Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan perluasan kegiatan ekonomi dan

keuangan syariah di Indonesia. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report 2022*, penggunaan teknologi digital menjadi salah satu kunci perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya sektor makanan dan minuman halal, keuangan Islam, wisata ramah muslim, fesyen modest, farmasi halal, dan media rekreasi halal. Hal ini ditandai oleh peningkatan signifikan pada investasi teknologi oleh perusahaan seperti GoTo, Traveloka (400 juta USD), LinkAja Syariah, Bank Syariah Indonesia, Alami (37.5 juta USD), dan lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang signifikan, perkembangan teknologi diupayakan untuk mendukung pengembangan dan perluasan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa hal yang perlu dilakukan ialah pengembangan *One Data Center* atau Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES). Hal ini diperlukan agar data ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih terintegrasi sehingga dapat mempermudah pemangku kebijakan dalam membuat keputusan, sarana evaluasi kinerja, dan sebagai bentuk transparansi publik. Upaya ini sudah mulai dilakukan melalui kerjasama antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). PDES ini diharapkan bisa segera terwujud dan dapat menjadi *backbone* dari data ekonomi syariah nasional.

Selanjutnya, gerakan filantropi Islam (zakat dan wakaf) berbasis kolaborasi digital. Platform digital memungkinkan pesantren atau institusi lainnya untuk dapat berinteraksi dan membangun kepercayaan langsung dengan donatur yang telah berkontribusi terhadap program zakat ataupun wakaf yang telah digulirkan. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan, mengefektifkan pengelolaan, dan distribusi dana zakat maupun wakaf sehingga dapat memaksimalkan nilai tambah dari instrumen

filantropi Islam tersebut.

Jaminan Perlindungan Konsumen

Aspek penting selanjutnya adalah kesadaran (*awareness*) dan perlindungan konsumen, khususnya terhadap produk halal. Lembaga konsultan Dinar Standard mencatat bahwa konsumsi produk halal Indonesia pada 2020 mencapai US\$ 184 miliar yang meliputi produk makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, media dan pariwisata. Berkaitan dengan peningkatan kesadaran terhadap produk halal, yang terutama dilakukan melalui percepatan sertifikasi halal, saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memverifikasi 95 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari 35 Negara. Lembaga akreditasi di negara setempat merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Adapun Akreditasi LHLN oleh lembaga akreditasi di negara setempat harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

Selanjutnya, percepatan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) juga dilakukan melalui optimalisasi fungsi dan peran halal center di Indonesia. Optimalisasi ini dilakukan dengan kerja sama antara LPH dan *Halal Center* untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan operasional bisnis produk halalnya di Indonesia.

Selain itu, penguatan perlindungan konsumen juga tercermin dari dijadikannya program Zona Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) sebagai prioritas pemerintah. Program ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM, KNEKS, BPJPH, Kementerian Kesehatan, dan Kemenparekraf untuk menyediakan produk halal dan thayyib bagi konsumen, akselerasi sertifikasi halal, peningkatan destinasi kuliner halal, dan percepatan *halal lifestyle* khususnya di bidang kuliner yang pada akhirnya diharapkan bisa memperkuat perlindungan bagi konsumen

muslim untuk mendapatkan haknya untuk mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya, Pemerintah menargetkan duplikasi zona KHAS ini di 13 titik, pada 8 provinsi khususnya di wilayah destinasi wisata ramah muslim.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 dan Dampaknya terhadap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Berdasarkan proyeksi PEBS FEB UI, kinerja makroekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap terjaga di tahun 2023 walaupun berada di tengah ancaman resesi dunia. Secara lebih spesifik, proyeksi pertumbuhan

baku mendominasi makanan dan minuman halal & modest fashion. Begitu juga dengan pariwisata halal, efek dari *commodity boom* sebelumnya yang menyebabkan kenaikan *income* pada top 20% kelompok pendapatan diiringi dengan melonggarnya kebijakan pembatasan perjalanan lintas wilayah sangat berpotensi mendorong munculnya *travel bubble* pada tahun 2023 mendatang.

Ke depannya, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023 diproyeksikan akan terus mengalami penguatan. Keuangan syariah diprediksi tumbuh sebesar 13–15%. Secara khusus, pertumbuhan DPK perbankan

Tabel 1.2 Indikator Makroekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi	4,9% – 5,2%
Tingkat Inflasi	3% – 4%
BI 7D-RRR	4 – 4,5
USD/IDR	14.500 – 15.000

Sumber: estimasi penulis

ekonomi diperkirakan berada pada rentang 4,9–5,2%, tingkat inflasi akan berada pada rentang 3–4%, suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 4–4,5 dan nilai tukar rupiah terhadap USD di rentang 14.500–15.000. Konsumsi domestik diperkirakan akan stabil dimana sektor yang akan mengalami penguatan adalah restoran, hotel, transportasi serta komunikasi. *Budget deficit* kembali ke disiplin fiskal 3% dari PDB. Berbagai kondisi ekonomi global dan domestik diproyeksikan akan berpengaruh terhadap peluang, tantangan serta kinerja sektor ekonomi dan keuangan syariah. Pada sektor Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah dimana diperkirakan kenaikan suku bunga yang akan berlanjut sehingga berdampak pada tingkat margin pembiayaan. Dengan demikian, perlu diwaspadai adanya risiko *Non-Performance Financing (NPF)* yang cukup besar. Selain itu, pada sektor pasar modal syariah, munculnya sentimen risk-off menyebabkan kenaikan *yield* sehingga pada akhirnya *equity price* menurun. Sedangkan pada sektor industri halal, diperkirakan akan terjadi *supply chain shock* di mana inflasi bahan

syariah diproyeksikan akan mencapai 7–9% dan pertumbuhan kredit berada pada kisaran 11–13%. Sektor IKNB Syariah juga diekspektasikan akan tumbuh, walaupun besarnya akan bervariasi antar sub-sektor. Investor diperkirakan akan melakukan diversifikasi dengan menitikberatkan investasi pada reksadana, saham syariah, serta sukuk. Sektor dana haji diperkirakan juga akan membaik, terutama dari segi pengelolaan dan tata Kelola. Selanjutnya, sektor ZISWAF diperkirakan akan tumbuh sangat pesat dengan pengumpulan mencapai 24–30 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan sektor keuangan mikro syariah cukup rendah dan diperkirakan ada dalam kisaran 4–5%. Sementara itu, industri halal diyakini dapat tumbuh lebih baik pada tahun 2023 terutama untuk sektor makanan dan minuman halal serta pariwisata halal dan *modest fashion*. Tidak hanya itu, ke depannya diperkirakan perkembangan teknologi *blockchain* akan bisa semakin menyentuh dan bermanfaat bagi industri ekonomi dan keuangan dan syariah agar lebih efisien operasionalnya dan inklusif cakupannya.



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probatio, Actus

PEBS FEB UI



Klaster Keuangan Komersil

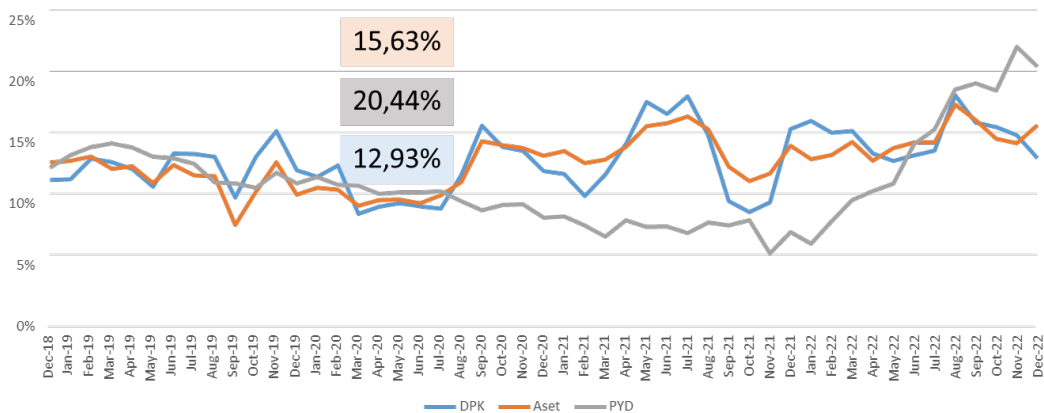
Klaster Keuangan Komersil

Perbankan Syariah

Kondisi Terkini

Secara umum, perkembangan perbankan syariah selama tahun 2022 sangat baik. Hal ini terlihat dari aset perbankan syariah di Indonesia yang tetap tumbuh positif sebesar 9,42% (yoy) hingga Desember 2022

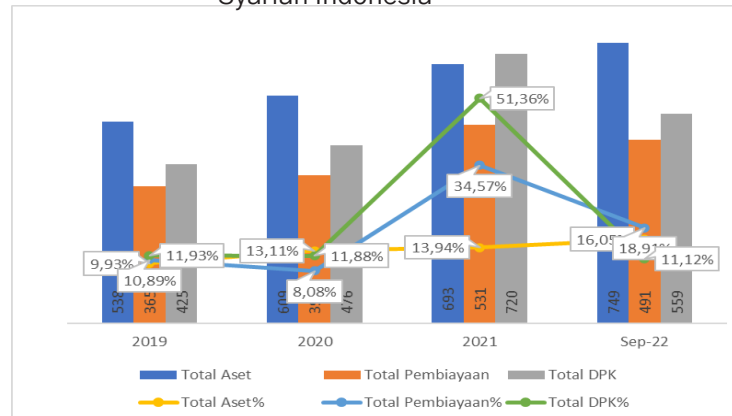
Gambar 2.1.1 Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)a

Tingginya tingkat kehati-hatian perbankan termasuk bank syariah pada saat pandemi membuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan Syariah lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan. Pada awalnya, Pemerintah dan Bank Indonesia merespond dengan menerapkan serangkaian stimulus fiskal dan moneter, termasuk menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia ke angka 3,50% sejak Februari 2021. Walaupun demikian, tingkat penyaluran pembiayaan perbankan Syariah masih tertahan. Akan tetapi, ketidakpastian global dan kemungkinan terjadinya resesi menjadi salah satu alasan yang menyebabkan tingkat suku bunga kembali meningkat pada beberapa periode terakhir. Hanya saja, peningkatan tingkat suku bunga tersebut justru menurunkan jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan termasuk perbankan syariah sebagaimana gambar 2.1.2.

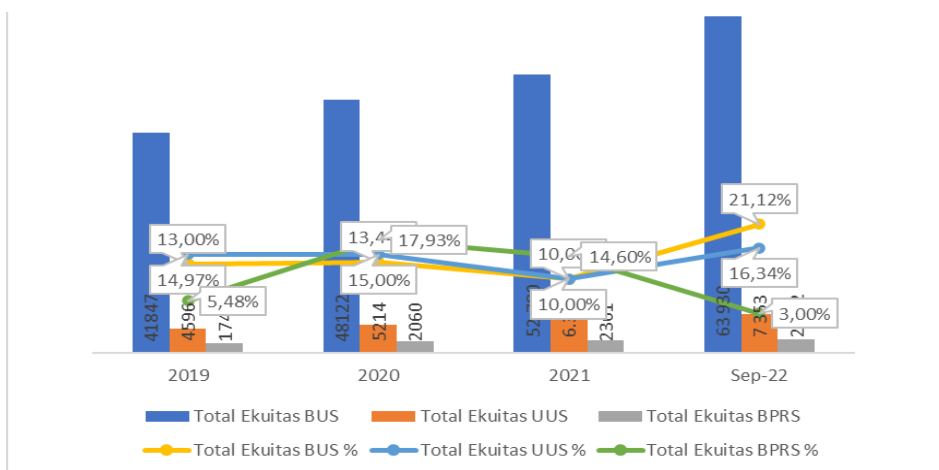
Gambar 2.1.2 Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

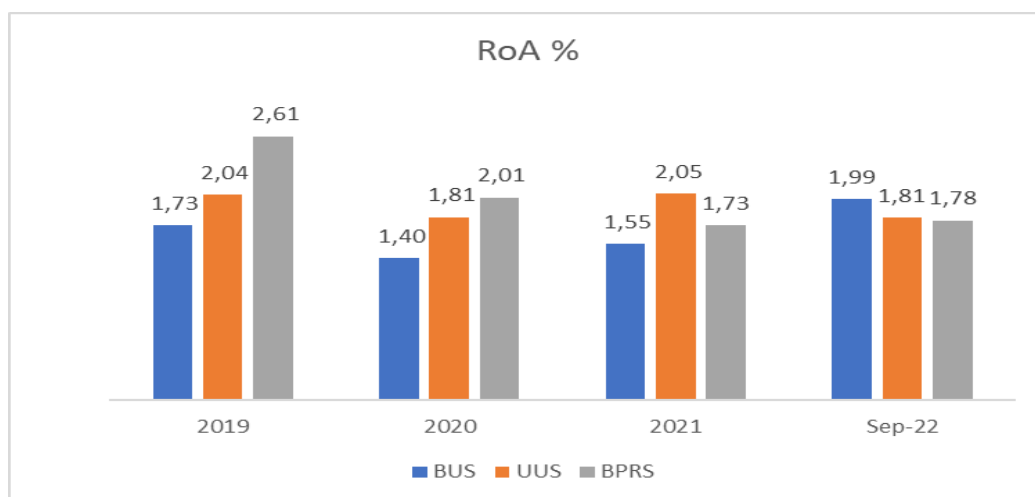
Selama pandemi, performa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami pertumbuhan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1.3. Akan tetapi, ekuitas BPRS mengalami penurunan yang cukup tajam dalam setahun terakhir. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan terutama apabila relaksasi yang diberikan

Gambar 2.1.3 Pertumbuhan Ekuitas BUS, UUS dan BPRS



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.1.4 ROA Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Bank Syariah (%)

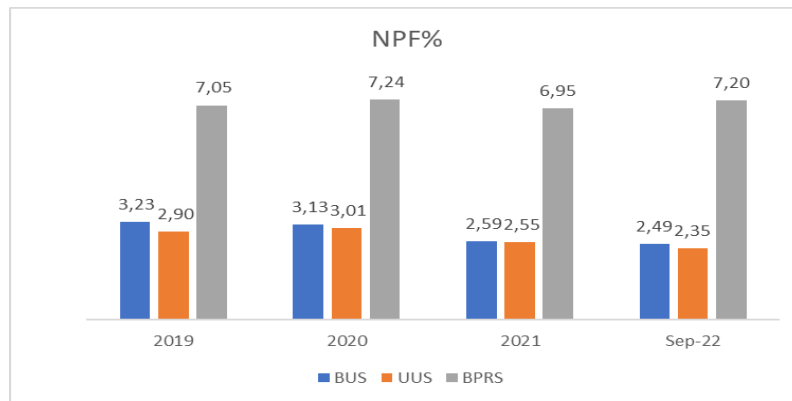


Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

OJK selama pandemic dicabut, kemungkinan pembiayaan bermasalah akan meningkat, maka bank termasuk bank syariah memerlukan modal yang cukup sebagai antisipasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Return on Assset (ROA)* pada hingga September 2022 lebih tinggi dibandingkan ROA UUS dan BPRS. Padahal, UUS dan BPRS sebelumnya selalu memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan BUS. Hal ini dapat menjadi indikasi BUS akhirnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mendorong efisiensi yang lebih baik lagi (lihat Gambar 2.1.4).

Sebagai bukti, Gambar 2.1.5 menunjukkan penurunan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)* BUS dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat rata-rata pembiayaan bermasalah BUS terus menurun. Akan tetapi, perhatian perlu diberikan kepada BPRS disebabkan rasio NPF sektor ini tumbuh hingga mencapai 7,20% dari total pembiayaan yang disalurkan.

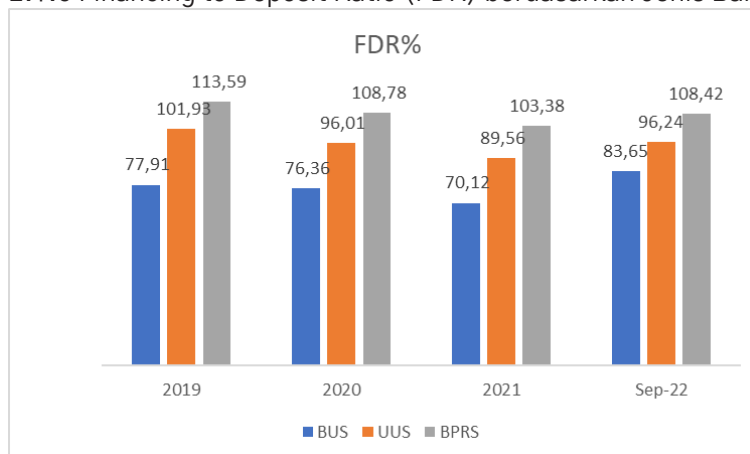
Gambar 2.1.5 NPF Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Bank Syariah



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Likuiditas BUS yang tercermin dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)* masih relatif terjaga di bawah 80% (lihat Gambar 2.1.6). Namun, FDR UUS dan BPRS masih cukup tinggi, mencapai 96,24% dan 108,42%, secara berturut-turut pada September 2022. Tingginya FDR UUS mungkin dapat dimengerti. UUS masih menjadi satu kesatuan dengan bank induknya, sehingga kemungkinan porsi pembiayaan syariah lebih besar dibandingkan porsi konvensional jika dikomparasikan dengan masing-masing simpanan dalam bank tersebut. Namun, bagi BPRS, FDR di atas 100% meningkatkan risiko likuiditas di masa depan.

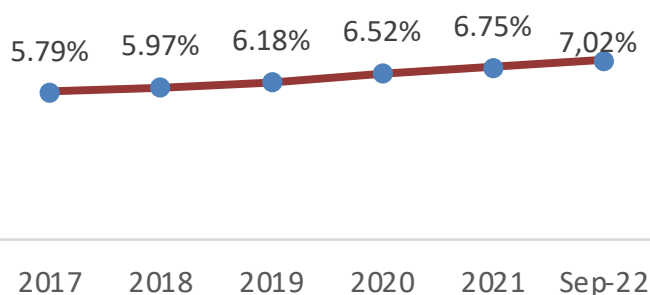
Gambar 2.1.6 Financing to Deposit Ratio (FDR) berdasarkan Jenis Bank Syariah (%)



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

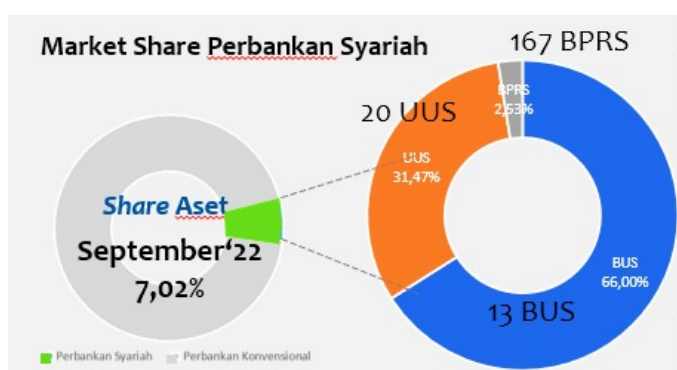
Meskipun memiliki kinerja yang cukup baik, *market share* perbankan Syariah terhadap industri perbankan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Gambar 2.1.6 dan 2.1.7 menunjukkan meskipun *market share* perbankan Syariah konsisten tumbuh, namun proporsinya baru mencapai 7.02% perbankan konvensional per September 2022. Ini tidak jauh berubah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila kewajiban *spin-off* tetap dijalankan, peluang pertumbuhan *market share* perbankan syariah akan lebih besar mengingat beberapa BPD telah menyatakan niatnya untuk konversi menjadi BUS. Akan tetapi, apabila aturan tersebut dibatalkan terutama setelah UU P2SK mengamankan OJK sebagai pihak yang menentukan kelanjutan tersebut, maka akan terjadi *status quo*, dimana tidak akan ada perubahan berarti dari industri perbankan syariah.

Gambar 2.1.7 Market Share Perbankan Syariah 2017–2022



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.1.8 Market Share dan Komposisi Industri Perbankan Syariah



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Peluang

Meskipun terdapat berbagai tantangan, peluang industri perbankan Syariah di Indonesia juga tidak kalah besar. Berbagai peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Kolaborasi Perbankan Syariah dengan Fintech Syariah. Sebagai bagian dari tren digitalisasi, kehadiran *financial technology* atau fintech berdasarkan prinsip Syariah fintech pada awalnya cukup mengkhawatirkan industri perbankan Syariah. Tetapi, dalam perjalanannya, kehadiran *fintech* Syariah menjadi suatu peluang yang cukup besar bagi perbankan Syariah disebabkan kolaborasi antara kedua belah pihak justru dapat saling menguatkan, alih-alih mendisrupsi dan berkompetisi. Pada satu sisi, fintech Syariah memiliki kelebihan untuk melakukan penetrasi ke segmen mikro yang selama ini sulit dijangkau industri perbankan dengan regulasinya yang lebih ketat. Namun di sisi lain, masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada industri

perbankan untuk menyimpan uangnya. Hal ini menyebabkan fintech Syariah juga kesulitan untuk mengakses pendanaan yang lebih besar sehingga menjalin kerjasama dengan bank Syariah menjadi langkah yang paling *feasible* bagi fintech untuk dapat berkembang lebih cepat. Meskipun demikian, diperlukan perencanaan bisnis yang lebih mapan agar kerjasama keduanya dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kedua, Partisipasi Bank Syariah dalam KPBU Syariah. Pada tahun 2021, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerjasama dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berhasil mewujudkan pilot project *Islamic Public Private Patnrnership (PPP)* atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah dalam bentuk Jalan Lintas Timur Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. KPBU Syariah membuka peluang bagi bank Syariah untuk dapat mengakses proyek-proyek besar yang dengan fasilitas penjaminan dari Pemerintah melalui PT PII. Dengan akses kepada pembiayaan berkualitas, diharapkan profil risiko perbankan Syariah akan semakin membaik. Hanya saja, masalah permodalan masih menjadi isu yang menghambat optimalisasi potensi KPBU Syariah. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh bank Syariah berarti membatasi kemampuan bank Syariah untuk mendanai proyek besar berkualitas tinggi.

Atas dasar tersebut, *skema investment account* di sisi pendanaan bank Syariah perlu didorong. Produk ini sebenarnya sudah ada, tetapi masih belum sempurna disebabkan aturan yang berlaku masih membuat produk ini serupa dengan produk simpanan pada umumnya. Dana investasi pada *investment account* tetap harus dipotong untuk pemenuhan giro wajib minimum, premi penjaminan simpanan, dan potongan-potongan lainnya. Kontras dengan skema investasi di pasar modal, di mana seluruh uang yang diinvestasikan betul-betul dapat diinvestasikan sehingga bisa memberikan imbal hasil yang lebih optimal.

Selain itu, terdapat aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi bank konvensional selaku induk bank Syariah untuk menempatkan dananya pada investment account anak usaha Syariahnya.

Ketiga, Implementasi UU P2SK. Implementasi ini membuka peluang bagi bank syariah untuk berinovasi menonjolkan karakter spesifik bank syariah karena diharapkan bank syariah dapat tumbuh dan kuat berdiri sendiri. Pada UU P2SK, bank syariah dapat menawarkan produk pendanaan investasi sesuai dengan aturan syariah tentang mudharabah. Produk investasi ini tidak lagi berbentuk giro, tabungan, atau deposito yang membuat produk bank syariah menjadi tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional. Akan tetapi, perlu ditunggu gebrakan bank syariah dan OJK terkait inovasi-inovasi tersebut yang diharapkan dapat membawa bank syariah betul-betul berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Tantangan

Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik untuk industri perbankan Syariah di Indonesia. Berbagai hal positif yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menjadi salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan perbankan Syariah. Masuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga menghadirkan secercah harapan agar bank Syariah pertama di Indonesia tersebut dapat berperan lebih kuat dalam memajukan ekonomi umat. Selain itu, dukungan pemerintah yang semakin besar terhadap industri halal juga membuka pasar yang lebih luas kepada bank Syariah untuk lebih maju melalui integrasi berbagai sektor dalam sistem ekonomi Syariah. Meskipun demikian, tetap saja terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi oleh industri perbankan Syariah nasional pada tahun mendatang.

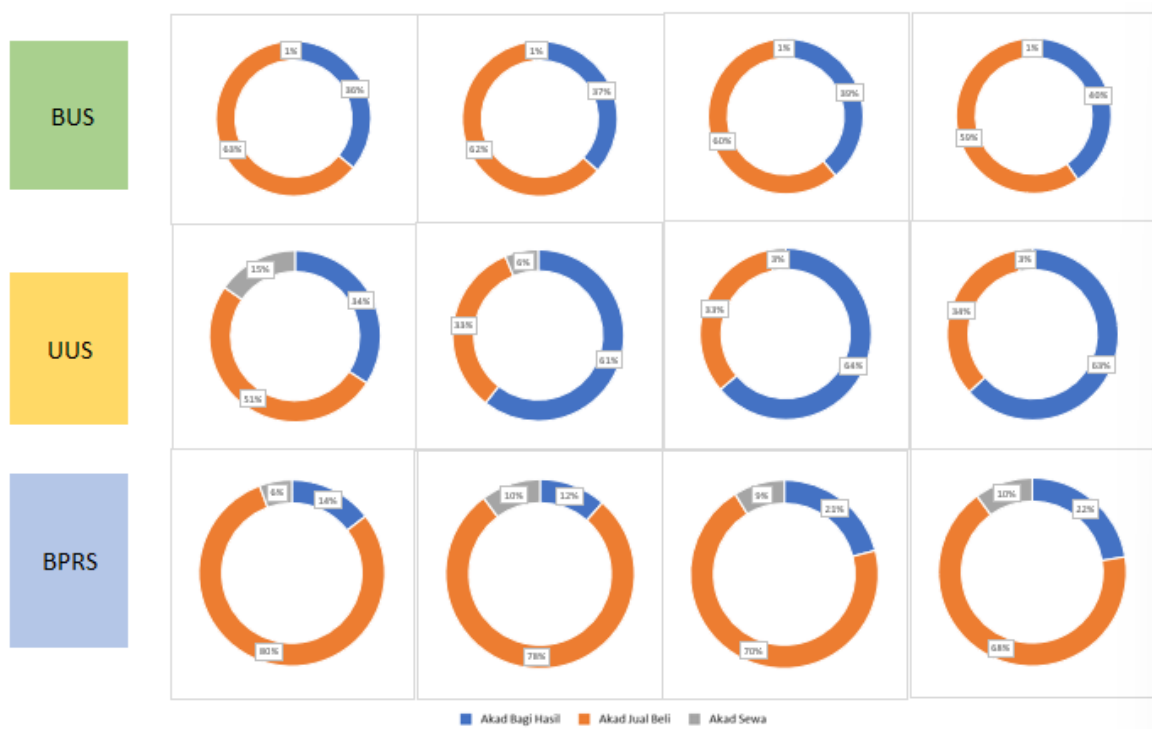
Terdapat sejumlah tantangan yang perlu

diperhatikan oleh industri perbankan Syariah pada tahun 2023, di antaranya: : 1) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara masif; 2) Keterbatasan modal membuat bank syariah sulit mengoptimalkan peluang lewat digitalisasi layanan perbankan syariah; dan 3) Industri perbankan syariah terlalu terkonsentrasi, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan stabilitas sistemik.

Salah satu isu yang dihadapi industri keuangan Syariah adalah rendahnya tingkat literasi. Berdasarkan Indeks Literasi Keuangan Syariah yang dirilis OJK pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan Syariah nasional hanya mencapai 9,14%. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022), tingkat literasi dan inklusi keuangan secara nasional sebesar 49,68% dan 85,10%. Sedangkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah sebesar 9,14% dan 12,12%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional dengan syariah. Oleh karena itu, perlu dorongan yang kuat baik dari regulator maupun industri dalam melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan kolaboratif. Wajar bila banyak elemen masyarakat tidak dapat melihat perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional. Pada akhirnya, masyarakat pun enggan untuk berpindah dari bank konvensional ke bank Syariah. Ditambah lagi, fakta bahwa mayoritas pemegang saham bank syariah adalah bank konvensional mengurangi insentif untuk membesarkan layanan perbankan syariahnya dengan optimal.

Salah satu hal yang mendiferensiasi layanan bank syariah adalah adanya akad-akad bagi hasil. Gambar 2.1.8 menunjukkan proporsi akad-akad bagi hasil semakin besar dibandingkan akad-akad lainnya. Penambahan porsi pembiayaan dengan akad-akad bagi hasil meningkat pesat terutama pada UUS yang pada September 2022 mencapai 67% dari seluruh portofolio pembiayaannya.

Gambar 2.1.9 Komposisi Akad dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah



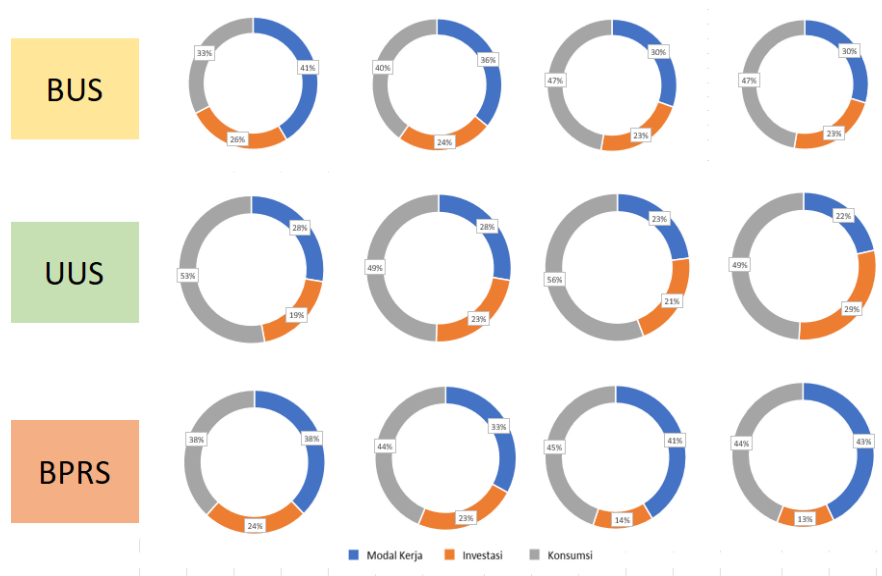
Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Kendati demikian, lebih dari separuh penyaluran pembiayaan akad bagi hasil UUS ditujukan untuk konsumsi (lihat Gambar 2.1.8). Meningkatnya pembiayaan untuk tujuan konsumsi juga terjadi pada BUS, di mana pada tahun-tahun sebelumnya hanya mencapai sepertiga dari keseluruhan portofolio pembiayaan. Namun pada September 2022 hampir mencapai 50% dari portofolio pembiayaan BUS.. Kedepan, pembiayaan bagi hasil untuk tujuan modal kerja dan investasi perlu ditingkatkan agar ada perbedaan nyata antara bank Syariah dan bank konvensional.

Diharapkan, penggunaan akad bagi hasil sejatinya tidak hanya di sisi pembiayaan saja. Bank Syariah di Indonesia seharusnya juga sudah mulai menerapkan bagi hasil murni di sisi pendanaan. Pada tahun 2018, OJK telah melakukan kajian mengenai *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) yang kemudian dilanjutkan kembali oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada

tahun 2019. SRIA ini dapat mengembalikan khittah bank Syariah sebagai bank yang murni bagi hasil. Saat ini, walaupun simpanan pada bank Syariah menggunakan akad mudharabah, tetapi perilaku mudharabah tersebut masih berupa simpanan – bukan investasi. Sudah saatnya perbankan Syariah di Indonesia mengikuti *best practices* di negara lain untuk memisahkan instrumen simpanan dan investasi. Jika nasabah hanya ingin menyimpan uang dan tidak terlalu memikirkan keuntungan, sebaiknya akad simpanan yang digunakan adalah akad wadiah atau akad lainnya. Tetapi, jika ingin mendapatkan keuntungan, bank Syariah perlu menyediakan akad yang bersifat murni investasi yang berbeda dengan produk simpanan sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas perbedaan bank Syariah dan bank konvensional yang sebenarnya.

Gambar 2.1.10 Komposisi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan



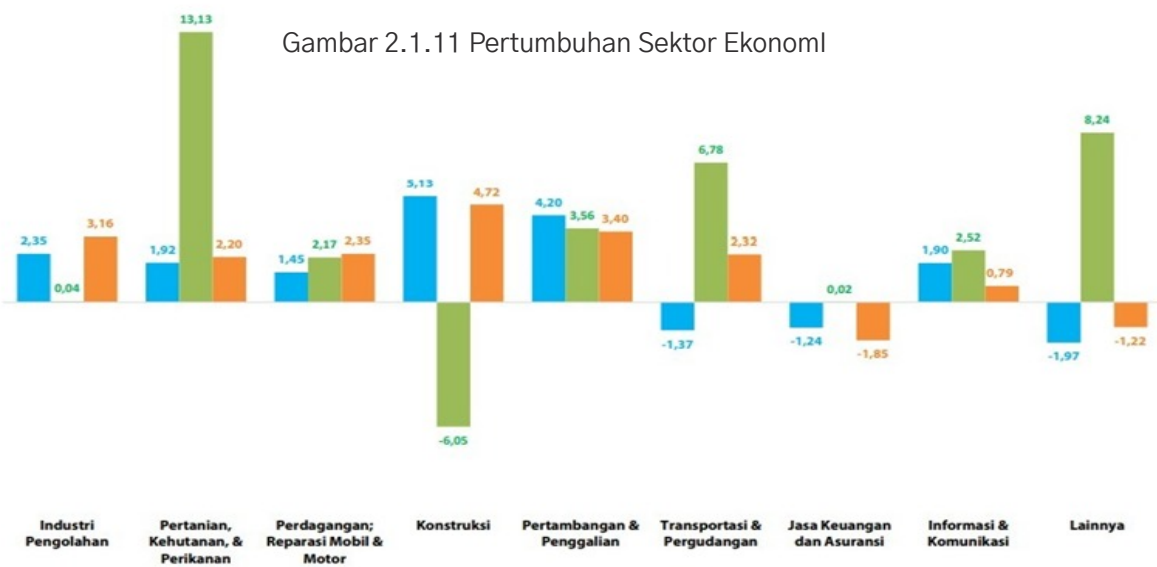
Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Keterbatasan modal juga membuat bank syariah sulit mengoptimalkan peluang lewat digitalisasi layanan perbankan syariah. Di samping itu, industri perbankan syariah yang terlalu terkonsentrasi, berpotensi menimbulkan permasalahan stabilitas sistemik.

Ekspektasi ke Depan

Data-data terkini terkait kondisi perbankan Syariah menunjukkan bahwa sistem perbankan Syariah kembali terbukti *resilient* dalam menghadapi guncangan ekonomi. Hanya saja, bank Syariah bukan berarti terbebas dari masalah. Karena bank Syariah sangat lekat dengan sektor riil, maka krisis ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kondisi perbankan Syariah. Akan tetapi, sistem risk-sharing melalui mekanisme bagi hasil membuat risiko yang dihadapi oleh bank Syariah juga akan diserap oleh nasabah. Oleh karena itu, dalam memproyeksikan kondisi perbankan Syariah, kondisi pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia di masa yang akan datang perlu menjadi acuan utama.

Gambar 2.1.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi

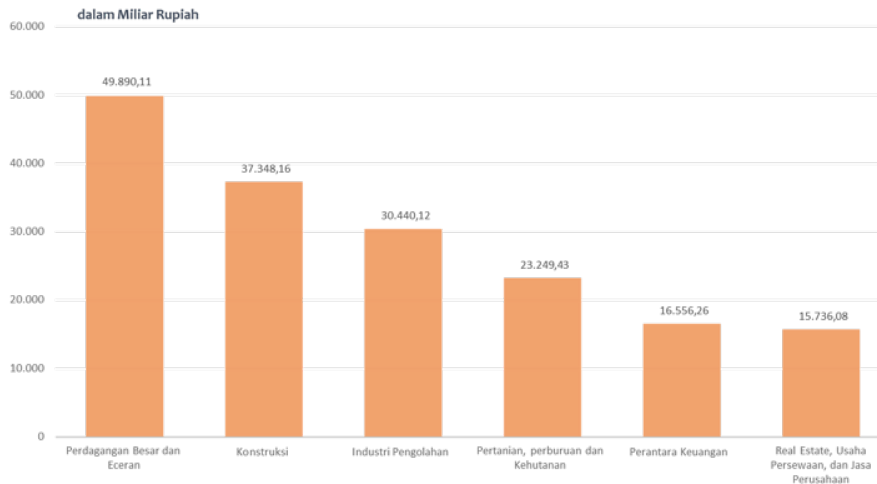


Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik (2022)



Pulihnya sektor-sektor di atas berimplikasi terhadap meningkatkan permintaan pembiayaan. Gambar 2.1.12 menunjukkan sektor-sektor yang paling banyak dibiayai perbankan Syariah sudah kembali tumbuh positif. Meskipun demikian, bank Syariah perlu memikirkan bagaimana bisa memaksimalkan potensi proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional yang positif di masa yang akan datang, mengingat ekonomi masih dalam tahap pemulihan dan pandemi belum sepenuhnya usai.

Gambar 2.1.12 Sektor Pembiayaan Perbankan Syariah 2022



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Perbankan syariah memegang peran penting sebagai salah satu katalisator perekonomian karena memiliki proyeksi yang terjaga seiring dengan tren perbankan 2023 seperti: era dimana tingkat suku bunga menjadi tinggi, persaingan *funding* yang semakin ketat, persaingan layanan digital perbankan dan perkembangan *sustainable finance*, diprediksi pertumbuhan DPK bank syariah mencapai 7–9% dan pertumbuhan pembiayaan berada pada kisaran 11–13%.

Rekomendasi

Untuk mendorong pengembangan industri perbankan Syariah yang berkelanjutan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025. Dalam *roadmap* tersebut, telah ditentukan tiga strategi utama pengembangan industri perbankan Syariah yaitu: 1) Penguatan SDM, permodalan, tata Kelola dan identitas perbankan Syariah; 2) Sinergi ekosistem ekonomi Syariah; dan 3) Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Ketiga strategi ini disusun untuk mewujudkan visi perbankan Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi perbankan Syariah terkini, proyeksi kedepan, serta peluang dan tantangannya, paling tidak terdapat 3 rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan oleh *stakeholders* perbankan Syariah termasuk oleh OJK sebagai otoritas perbankan dan bank Syariah sendiri selaku pelaku pasar. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penguatan SDM, Permodalan, Tata Kelola, dan Identitas Perbankan Syariah. Terdapat dua rekomendasi untuk penguatan identitas perbankan Syariah, yaitu: a) inovasi model bisnis bank Syariah untuk membangun keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi; dan b) harmonisasi core values bank Syariah untuk penguatan identitas dan nilai-nilai Syariah.

Diskusi inovasi model bisnis bank Syariah diperlukan untuk mencari model bisnis alternatif yang dapat ditawarkan oleh bank Syariah guna memperkuat eksistensidan

diferensiasi dibanding perbankan konvensional. Inovasi model bisnis ini tidak dimaksudkan untuk mengganti model bisnis yang telah diterapkan saat ini. Walaupun banyak yang mengkritisi model bisnis yang saat ini diterapkan bank Syariah hanya meniru model bisnis bank konvensional, kehadiran bank konvensional selama ratusan tahun telah memvalidasi kebutuhan masyarakat yang memang harus dipenuhi dengan tetap memastikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Meskipun begitu, bukan berarti bank Syariah telah merasa cukup dan puas diri karena telah mampu menghadirkan produk dan jasa yang sama dengan bank konvensional. Bank Syariah harusnya lebih mampu menonjolkan aspek Syariah yang tidak hanya sebatas kepatuhan kepada akad-akad Syariah. Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya harus mampu menghadirkan nilai-nilai yang menjadi dasar ekonomi Syariah seperti keadilan, tolong menolong, keberlanjutan, dan kolaborasi. Untuk itu, nilai-nilai ekonomi Syariah memang perlu ditanam ulang dalam benak segenap *stakeholders* bank Syariah karena kesesuaian terhadap prinsip Syariah tidak hanya berarti telah menerapkan akad-akad Syariah sesuai dengan fatwa, tetapi juga telah berperilaku sesuai dengan tuntunan Syariah itu sendiri.

OJK dan BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mewujudkan tata kelola Bank Syariah yang efektif dan tangguh, antara lain:

- PBI Nomor 11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Meskipun demikian, tetap diperlukan perbaikan dalam hal tata kelola syariah. OJK

sebagai regulator industri perbankan syariah diharapkan dapat menyusun ketentuan terkait tata kelola syariah.

Kedua, Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah. Dalam rangka peningkatan peran bank syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan adanya:

- Sinergi dengan industri halal;
- Sinergi dengan lembaga keuangan sosial islam;
- Sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya;
- Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga.

Terdapat dua kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu penyusunan strategi kolaborasi bank Syariah dan lembaga keuangan Syariah lainnya serta penyusunan rencana integrasi strategi bisnis bank Syariah dan industri halal menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah dunia. Strategi kolaborasi antara perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah lain terutama fintech Syariah perlu dimatangkan. Derasnya aliran dana masuk dari investor luar negeri kepada fintech domestik lambat laun dapat membuat fintech Syariah semakin tersingkir. Oleh karena itu, perlu ada strategi kolaborasi yang disepakati secara makro dan diterapkan secara mikro untuk memperbesar *size* perbankan Syariah dengan lebih cepat. Rencana integrasi strategi bisnis bank Syariah dengan para pelaku industri halal juga perlu dibangun. Saat ini tidak terdapat keharusan industri halal menggunakan pembiayaan dari bank Syariah ataupun instrumen keuangan Syariah lainnya. Amat disayangkan apabila industri halal justru menggunakan jasa perbankan konvensional dengan alasan lebih murah dan mudah diakses.

Ketiga, Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan. Pengaturan perbankan Syariah di Indonesia sebenarnya telah cukup baik dan memadai jika dibandingkan dengan pengaturan perbankan Syariah di negara lain. Indonesia merupakan salah

satu negara pendiri *Islamic Financial Services Board (IFSB)* sebagai *international standard setting body* yang menyusun standar kehati-hatian lembaga keuangan Syariah di seluruh dunia. Standar-standar yang diterbitkan IFSB tersebut menjadi rujukan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas industri perbankan dalam menyusun peraturan dan ketentuan perbankan Syariah.

Meskipun demikian, pengaturan *Shariah Governance* atau Tata Kelola Syariah masih perlu diperkuat. Perlu aturan yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang melanggar prinsip Syariah. Selain itu, transaksi yang dianggap tidak sesuai Syariah juga harus dibatalkan dan segala pendapatan terkait transaksi tersebut harus disumbangkan untuk tujuan sosial. Kerasnya aturan terkait kepatuhan terhadap prinsip Syariah ini sangat diperlukan untuk mempertegas marwah perbankan Syariah sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menyatakan bank Syariah sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu, paling tidak terdapat dua hal yang harus menjadi pertimbangan: 1) membuat pengaturan yang komprehensif terkait kewajiban adanya sharia audit baik dari sisi internal maupun eksternal, dan 2) memperkuat fungsi dewan pengawas Syariah (DPS) di perbankan Syariah.

Selain itu, peraturan *Investment Account* juga perlu disempurnakan untuk membuka peluang dana yang lebih besar untuk proyek-proyek terkait KPBU Syariah. Pengaturan perlu membuat *investment account* betul-betul menjadi produk investasi sehingga tidak perlu membayar premi penjaminan simpanan dan tidak terkena Giro Wajib Minimum (GWM).

Regulasi ini juga perlu menjadikan *investment account* mendapat keringanan pajak sama halnya dengan produk reksa dana, serta tidak perlu terdapat aturan BMPK apabila bank induk yang menjadi investor apabila dan menerapkan mekanisme *platform sharing* dengan anak usaha Syariahnya. Keberadaan *investment account* ini juga bisa menjadi nilai jual tersendiri bagi bank Syariah di Indonesia yang ingin menarik *Foreign Direct Investment (FDI)*.

Keempat, Dorongan Berinovasi oleh Bank Syariah. Sebagai dampak perkiraan likuiditas yang semakin ketat, industri perbankan syariah didorong untuk lebih inovatif karena diperlukan layanan prima yang cepat dan dapat memberikan pricing kompetitif dan variasi produk yang juga didukung melalui sinergi & digitalisasi perbankan syariah. Dampak normalisasi kebijakan moneter menyebabkan ketersediaan likuiditas lebih ketat pada akhir 2022 dan awal 2023. Hal tersebut perlu menjadi perhatian industri perbankan syariah, utamanya dalam hal meningkatkan pertumbuhan dana murah di tahun mendatang.

Kelima, Peningkatan Akses Layanan Finansial melalui *Strategy Hybrid* baik jaringan cabang dan layanan digital. Sebelum pandemi, bank mendorong pertumbuhan jaringan kantor cabang di berbagai daerah. Namun, setelah pandemi, bank mendorong pertumbuhan jaringan *hybrid* dimana layanan digital membantu layanan perbankan hingga ke pelosok daerah, terjadi kenaikan 21 juta transaksi dengan 72% adalah konsumen baru diluar kota besar.

Pasar Modal

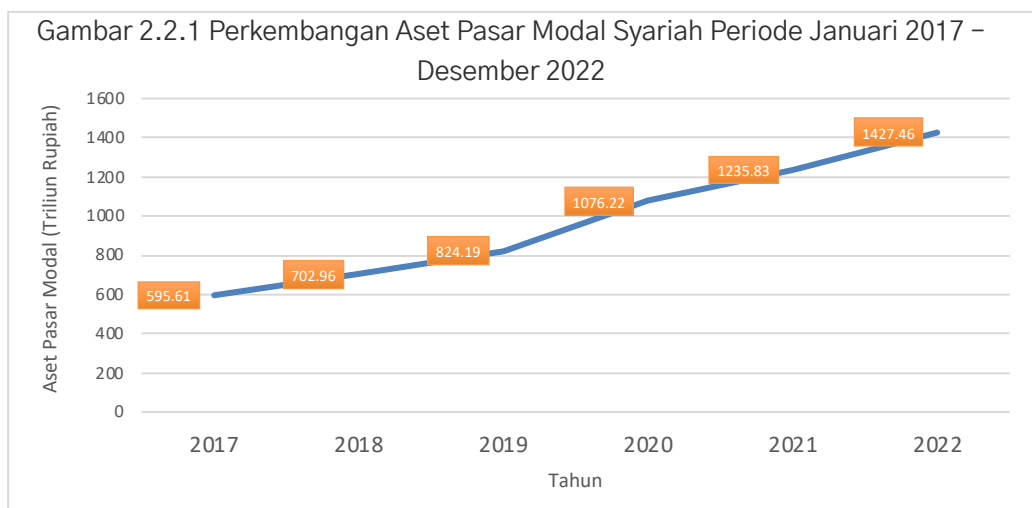
Kondisi Terkini

Secara umum, sektor pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kenaikan aset pasar modal. Bahkan, pada akhir tahun 2022, aset pasar modal syariah naik hampir sebanyak tiga kali lipat dibandingkan tahun 2017. Di sisi lain, sukuk mengalami perkembangan yang sangat baik dibandingkan instrumen lainnya baik secara nasional. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai outstanding dan jumlah penerbitan sukuk outstanding baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Jumlah aset saham syariah juga berkembang dengan baik karena terjadi peningkatan jumlah saham syariah setiap tahunnya walaupun sempat mengalami penurunan di awal tahun 2021 akibat munculnya wabah pandemi.

Aset pasar modal syariah selalu mengalami

tren kenaikan hingga periode Desember 2022 walaupun *market share*-nya masih di bawah pasar modal konvensional. Pada tahun 2017, aset pasar modal syariah sebesar Rp595,61 triliun, namun pada periode Desember 2022, aset pasar modal syariah naik, yaitu menjadi Rp1,427.46 triliun. Sementara itu, *market share* pasar modal syariah saat ini yaitu sebesar 18,27% dan sangat berbanding lebih rendah dengan *market share* pasar modal konvensional (OJK, 2022).

Instrumen pasar modal syariah di Indonesia saat ini terdiri dari saham syariah, sukuk, serta reksadana syariah. Pada September 2022, saham syariah memiliki nilai yang paling besar dari segi jumlah aset dan *market share* di antara instrumen pasar modal syariah lainnya yang dapat dilihat pada tabel 2.2.1.



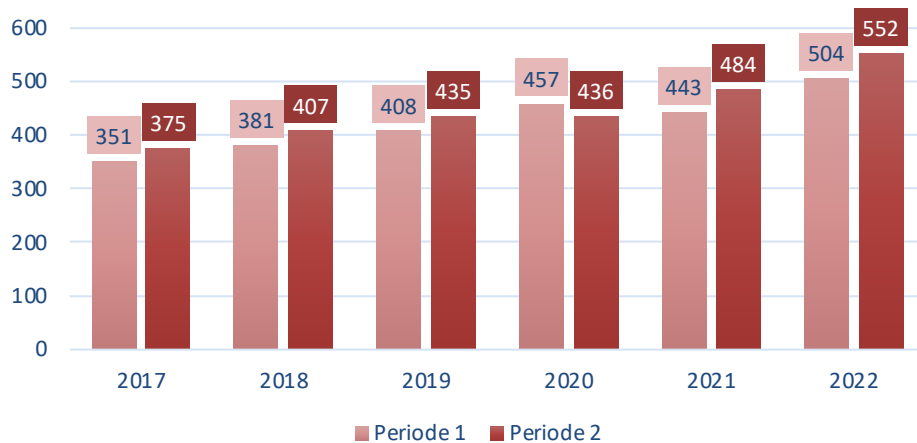
Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Tabel 2.2.1 Jumlah Aset dan Market Share Instrumen Pasar Modal Periode September 2022

Instrumen	Market Share Nilai Efek (%)
Saham Syariah	47,14%
Sukuk Korporasi	8,52%
Reksa Dana Syariah	7,60%
Sukuk Negara	20,08%

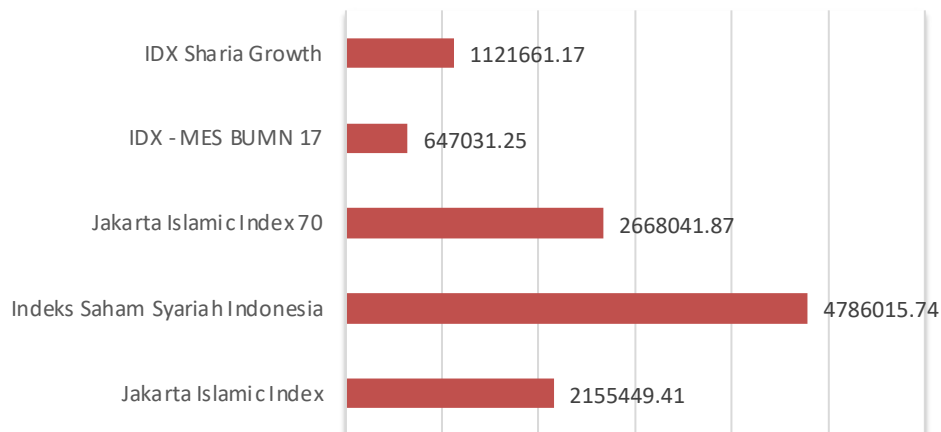
Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.2.2 Perkembangan Jumlah Saham Syariah Periode 1 2017 – Periode 2 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.2.3 Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia Periode Desember 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Saham Syariah

Jumlah saham syariah cenderung mengalami tren peningkatan pada setiap periodenya dari tahun ke tahun (Periode satu 2017 – Periode dua 2022). Akan tetapi, pada awal tahun 2021 (periode satu) jumlah saham syariah cenderung mengalami penurunan diiringi dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, jumlah saham syariah menunjukkan tren kenaikan kembali pada periode dua tahun 2021 hingga periode dua tahun 2022. Tren kenaikan jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) dapat dilihat melalui gambar 2.2.2 di bawah ini. Adanya tren kenaikan pada masa

pemulihan ekonomi dapat disebabkan karena return yang ditawarkan pasar modal lebih tinggi dari produk deposito perbankan.

Selanjutnya, hingga Desember 2022, Indonesia memiliki lima indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII), JII70, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), IDX-MES BUMN17, dan IDXSHARIAGROWTH. Pada Desember 2022, nilai kapitalisasi pasar indeks syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang paling besar di duduki oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu mencapai Rp4,786,015 miliar (Gambar 2.2.3).

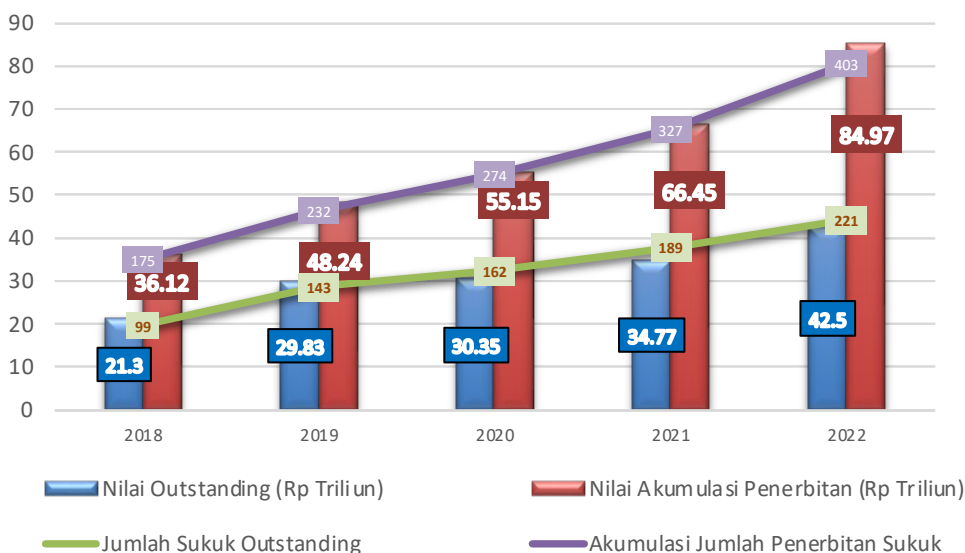
Sukuk

Sukuk terbagi menjadi sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara adalah jenis produk investasi syariah yang berasal dari penawaran pemerintah kepada warga negara secara individu. Penerbitan sukuk di Indonesia masih didominasi oleh sukuk negara. Penyebab rendahnya perkembangan sukuk korporasi, yaitu tingginya nominal penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan sukuk negara. Selanjutnya, beban biaya administrasi sukuk korporasi juga cukup besar.

Tren peningkatan sukuk korporasi terjadi setiap tahunnya, baik dari segi nilai outstanding, jumlah sukuk *outstanding*, nilai akumulasi, dan akumulasi jumlah penerbitan sukuk. Wabah pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 tidak memberikan dampak penurunan terhadap pertumbuhan sukuk korporasi, tetapi sebaliknya sukuk korporasi justru tetap menunjukkan kinerja yang positif. Pada akhir tahun 2022, nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp. Rp 42,50 triliun sementara jumlah sukuk outstandingnya sudah berjumlah 221 atau sebesar 3% dari total *outstanding* sukuk yang ada di Indonesia.

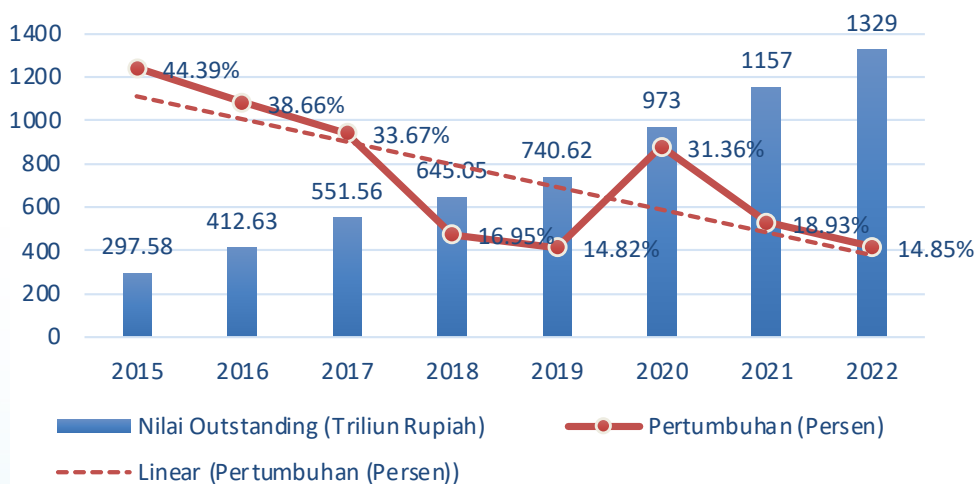
Gambar 2.2.4 menunjukkan perkembangan sukuk korporasi melalui penawaran umum.

Gambar 2.2.4 Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum Periode Desember 2018 – 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.2.5 Nilai Outstanding Sukuk Negara Periode Desember 2015–November 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Nilai *outstanding* sukuk negara juga mengalami tren kenaikan. Akan tetapi, persentase pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada November 2022 nilai *outstanding* sukuk negara mencapai Rp1,329 triliun (Gambar 2.2.5). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai *outstanding* sukuk korporasi. Nilai sukuk negara sebesar 97% dari total sukuk yang ada di Indonesia. Saat ini, sukuk dapat diperdagangkan dengan mudah dan cepat secara daring di Indonesia.

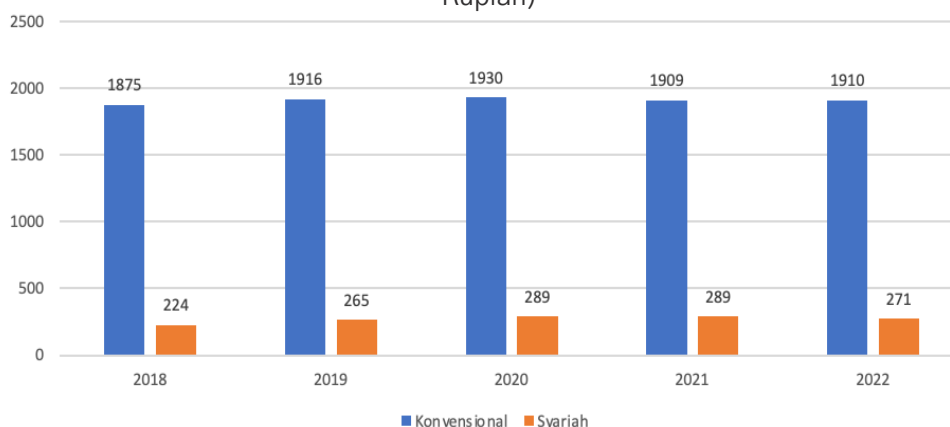
Reksadana Syariah

Reksadana Syariah terus tumbuh dari 2018–2020 yang dapat dilihat dari jumlah dan NAB nya, tetapi sedikit turun di 2020–2022 karena dampak pandemi Covid-19 (Gambar 2.2.6

dan 2.2.7).

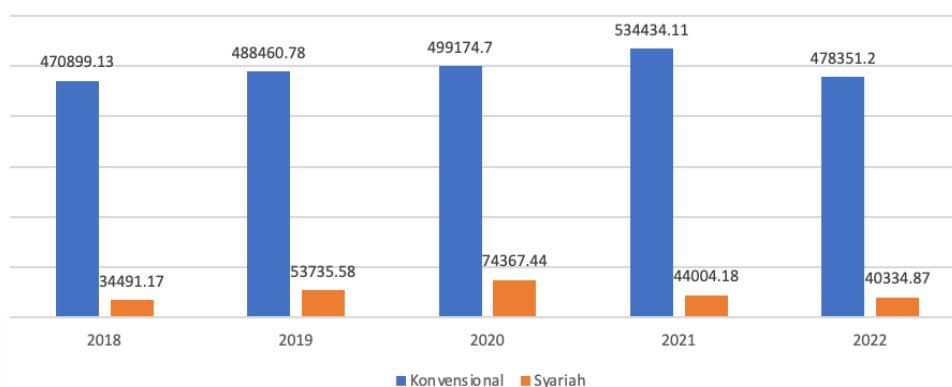
Adapun secara variasi jenisnya, reksadana syariah masih didominasi oleh pasar uang, yaitu sebesar 27% (Gambar 2.2.7). Dari sisi permintaan, hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat masih rendah sehingga reksa dana masih didominasi oleh produk sederhana (pasar uang). Dari sisi penawaran, inovasi jenis reksadana syariah masih sangat terbatas sehingga pilihan investor masih di dominasi oleh instrumen yang *low risk, low return*. Selain itu, dari sisi marketingnya, penjual reksa dana dapat lebih masif dan inklusif untuk menarik investor berinvestasi selain hanya di pasar uang.

Gambar 2.2.6 Perkembangan Jumlah Aset Reksadana Periode Desember 2018–Oktober 2022 (Miliar Rupiah)



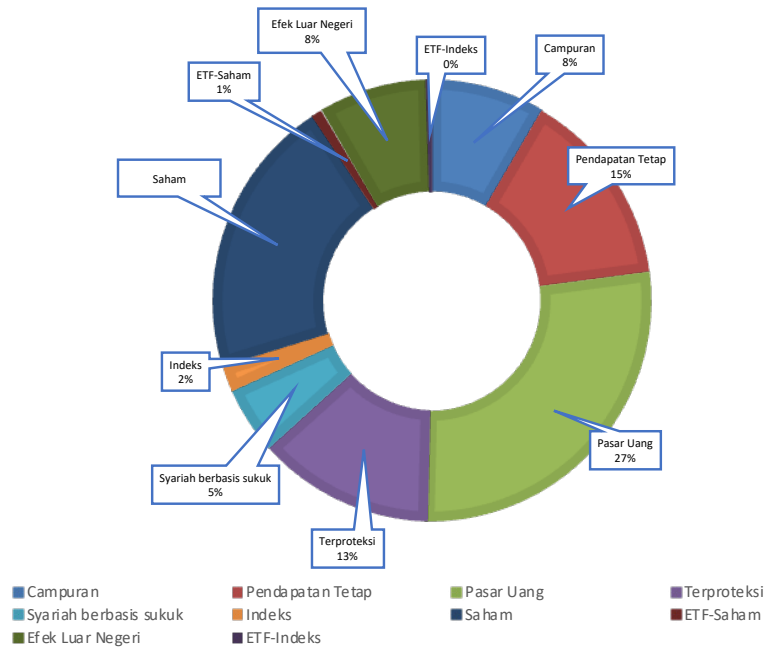
Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.2.7 Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Periode Desember 2018–Oktober 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.2.8 Jenis Reksadana Periode Oktober 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Peluang

Salah satu peluang pada pertumbuhan pasar modal, yaitu karena munculnya fenomena bonus demografi di Indonesia sehingga meningkatkan literasi perencanaan keuangan, termasuk dalam investasi di pasar modal. Perkembangan digitalisasi juga meningkatkan potensi pengembangan instrumen di pasar modal khususnya pada instrumen saham dan reksadana. Di samping itu, pandemi Covid-19 membuat adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mengalokasikan dananya ke pasar modal. Munculnya dukungan dan beberapa regulasi dari pemerintah juga berdampak positif terhadap pasar modal syariah terutama terkait aturan penerbitan sukuk dan surat utang negara.

Tantangan

Tantangan utama pada pasar modal syariah, yaitu pertama, adanya shock yang diakibatkan pandemi dan inflasi sehingga investor mengalami kerugian dari return yang didapatkan. Kedua, tingkat literasi dan inklusivitas keuangan syariah rendah juga menjadi tantangan fundamental. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan syariah sebesar 9,14% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Ketiga, lambatnya tingkat penerbitan sukuk korporasi dan tingginya tingkat biaya penerbitan serta preseden buruk terhadap beberapa aksi korporasi beberapa perusahaan besar di bursa saham (IPO GOTO dan BUKA). Keempat, semakin banyaknya pilihan (alternatif) investasi masyarakat.

Ekspektasi ke depan

Pasar modal syariah akan terus tumbuh ke depannya karena beberapa hal berikut. Pertama, upaya para stakeholders meningkatkan tingkat literasi, serta inovasi R&D. Konsep edukasi pasar modal syariah juga diharapkan semakin terintegrasi, yaitu dengan melibatkan banyak stakeholders, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional, pendakwah, jaringan pesantren, dan stakeholders lainnya.

Kedua, adanya bonus demografi dan digitalisasi sehingga diharapkan masyarakat melakukan diversifikasi investasi dengan

menitikberatkan investasi di reksadana, saham syariah, serta sukuk. Perkembangan era teknologi dan digitalisasi yang mampu memudahkan dan membuat tingkat efisiensi yang semakin tinggi, akan memberikan peluang yang cukup besar bagi instrumen pasar modal syariah untuk meningkatkan pertumbuhan aset dan menarik investor khususnya generasi millennial saat ini.

Jumlah daftar efek syariah diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang IPO di pasar modal. Lalu, tren investasi lain akan menurun karena pasar modal memiliki dua pemain, yaitu pemain lama dan pemain baru (*swing player*), tetapi kontribusi (*volume*) relatif masih kecil (*back to normal equilibrium*) dan, dengan situasi yang tidak pasti, pola investasi masyarakat akan kembali ke yang lebih aman. Dinamika dari sektor potensial *fast-moving consumer goods* (FMCG), manufaktur, konstruksi, agribisnis (sektor konservatif), dan sektor keuangan akan tetap terjaga karena merupakan *back up* atau cerminan sektor riil.

Produk pasar modal syariah berbasis linkage dengan dana sosial Islam akan meningkat, melanjutkan kisah sukses Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS). Selain itu, pertumbuhan ISSI akan melampaui pertumbuhan IHSG karena saham syariah memiliki *screening* yang lebih ketat seperti, aturan likuiditas, pendapatan non halal dan lainnya sehingga fundamentalnya lebih terjaga. Adanya aplikasi baru akan memberikan kemudahan masuk pasar modal dan akan meningkatkan permintaan terhadap instrumen pasar modal syariah.

Rekomendasi

Pelaku industri pasar modal syariah harus mampu meningkatkan dan melakukan inovasi serta transformasi digital agar dapat memenuhi kebutuhan dan karakteristik konsumen. Peningkatan inovasi dalam R&D akan membantu produk pasar modal agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik permintaan di pasar. Rencana aksi penambahan variasi dan layanan produk, seperti peningkatan penerbitan sukuk korporasi dan mengembangkan sekuritisasi melalui produk investasi yang dapat berupa efek berangun aset berbentuk surat partisipasi, surat utang, serta efek berangun aset syariah menjadi strategi dan arah pengembangan utama sebagai upaya penguatan bisnis pasar modal syariah (OJK,2022).

Integrasi produk pasar modal syariah dan keuangan sosial Islam perlu terus dikembangkan, misalnya dengan wakaf saham, reksadana wakaf, wakaf sukuk, dan lain sebagainya. Di samping itu, ekosistem keuangan berkelanjutan juga perlu dipersiapkan dengan cara menyiapkan landasan hukum penerbitan green sukuk serta menerbitkan instrumen syariah yang sejalan dengan nilai - nilai environmental, sosial, dan governance (OJK,2022).

Regulasi dari sisi demand juga harus diperluas. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan penerbitan sukuk dan portofolio investasi, misalnya dengan cara memberikan ketentuan batas jumlah sumber pendanaan BUMN serta *market capital* melalui sukuk.

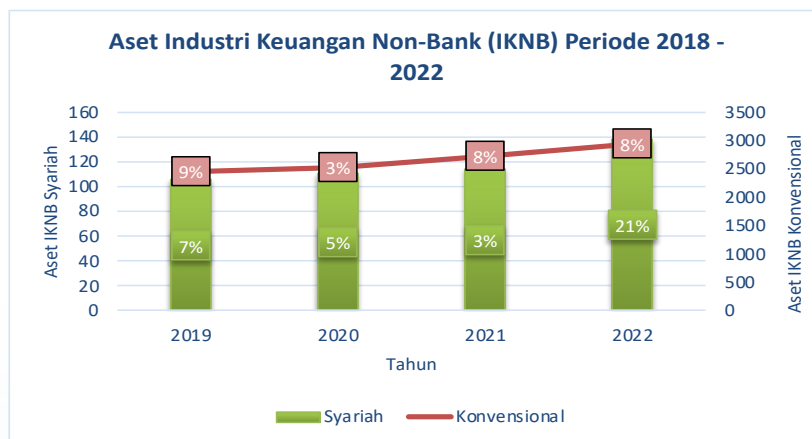
Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Kondisi Terkini

Secara umum, industri IKNB syariah menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset IKNB syariah dan pertumbuhan jumlah pelaku IKNB. Berdasarkan data OJK (2022), *market share* IKNB syariah sudah mencapai 4,73% pada akhir tahun 2022 atau meningkat dari 4,25% pada akhir tahun sebelumnya. Di samping itu, seiring dengan perkembangan teknologi, *fintech* syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik karena dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah aset tiap tahunnya. *Fintech* syariah juga menunjukkan perannya yang semakin besar terhadap perekonomian saat ini yang dapat dilihat dari adanya peran *fintech* syariah dalam ekosistem jasa keuangan syariah. Di sisi lain, pelaku Perusahaan Modal Ventura (PMV) syariah juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik yang dilihat dari pertumbuhan dari segi asetnya walaupun jumlah pelakunya masih sangat sedikit.

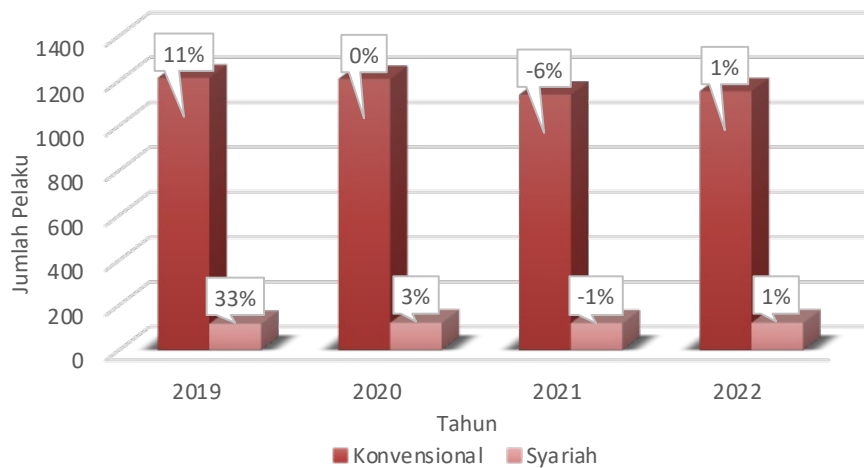
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Indonesia terdiri dari Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Khusus, Jasa Penunjang, Lembaga Keuangan Mikro, dan Fintech. Aset IKNB Syariah tumbuh sejalan dengan aset IKNB konvensional, bahkan dari tahun 2021 ke tahun 2022, pertumbuhan aset IKNB Syariah mencapai 21% dan melampaui pertumbuhan IKNB konvensional (Gambar 2.3.1). Sementara itu, pelaku IKNB Syariah juga tumbuh 33% dari 2018–2019 meskipun setelahnya mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan (Gambar 2.3.2). Secara proporsi aset, tidak terjadi perubahan berarti dalam empat tahun terakhir (2019–2022) di mana dominasi tetap di asuransi syariah dan pembiayaan syariah (Gambar 2.3.3).

Gambar 2.3.1 Pertumbuhan Aset IKNB Periode Desember 2018 –2022



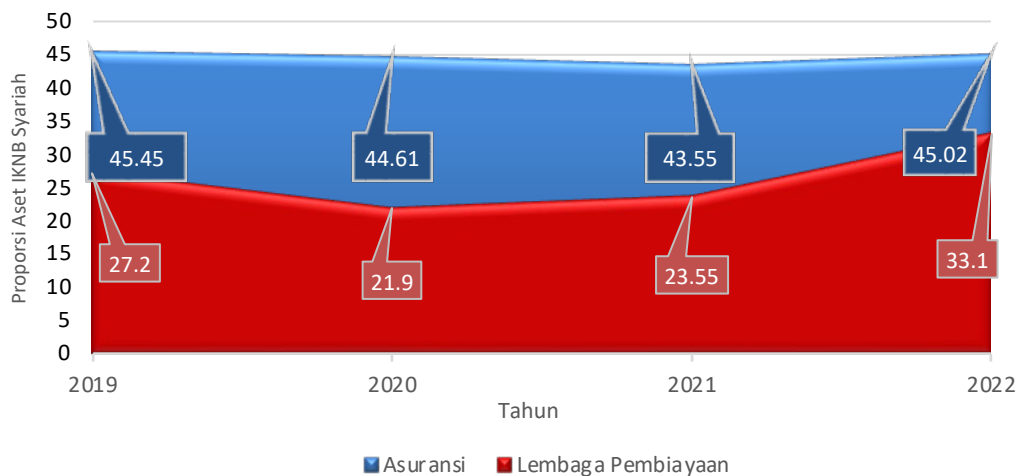
Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.3.2 Pertumbuhan Jumlah Pelaku IKNB Periode Desember 2018 – 2022



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.3.3 Perkembangan Proporsi Aset IKNB Syariah Desember 2019–2022 (Triliun Rupiah)



Sumber : diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Perkembangan Fintech Syariah

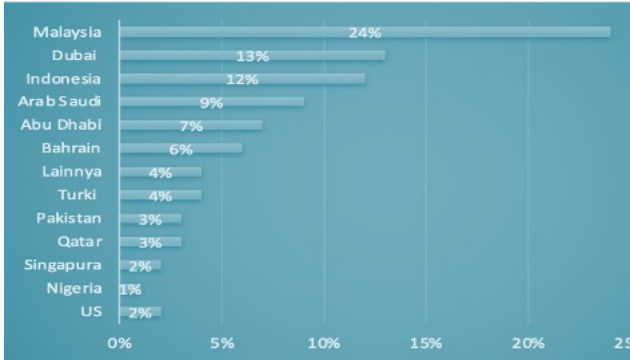
FinTech saat ini sedang merevolusi seluruh industri keuangan (Goldstein et al., 2019). Didorong oleh perusahaan start-up dan teknologi, Fintech mencakup berbagai aplikasi mulai dari *cryptocurrency*, pembayaran seluler, pembiayaan pasar, *robo-advisor*, dan lainnya (Böhme et al., 2015; Yu et al., 2017). Fintech telah mendapat perhatian yang signifikan tidak hanya dari kalangan praktisi, investor, regulator, tetapi juga konsultan dan akademisi yang ingin tahu tentang bagaimana teknologi baru dan perubahan ini memengaruhi organisasi dan bahkan sistem keuangan yang lebih luas (Stanko et al.,

2017).

Secara global, ekosistem fintech syariah yang suportif dan kondusif dipimpin oleh Malaysia dengan pangsa pasar 24%, diikuti oleh UEA sebesar 20%, sementara Indonesia naik (12%) di peringkat dari kelima pada tahun 2021 ke posisi ketiga pada tahun 2022, menggeser Inggris ke posisi keempat dengan 10%, diikuti oleh Arab Saudi (9%) (Gambar 2.3.4). Di Indonesia, ekosistem fintech syariah yang suportif didukung dengan hadirnya undang – undang yang mengatur keuangan *Peer to Peer (P2P) lending* yang lebih ketat dalam upaya membatasi pemain yang tidak

sehat. Sementara itu, ekosistem fintech syariah yang suportif di Malaysia, didukung dengan terbitnya lisensi bank digital (*IFN Financial Innovation Report, 2022*).

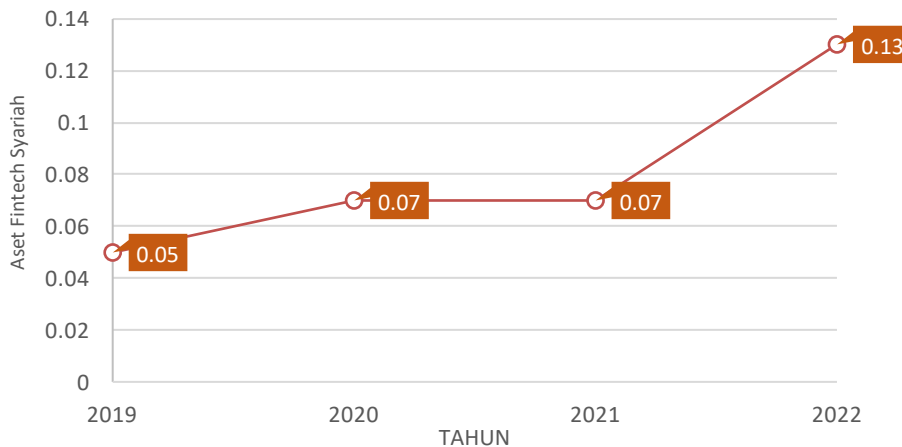
Gambar 2.3.4 Negara dengan Ekosistem Fintech yang Suportif dan Kondusif Tahun 2022



Sumber: diolah dari data Financial Innovation Report (2022)

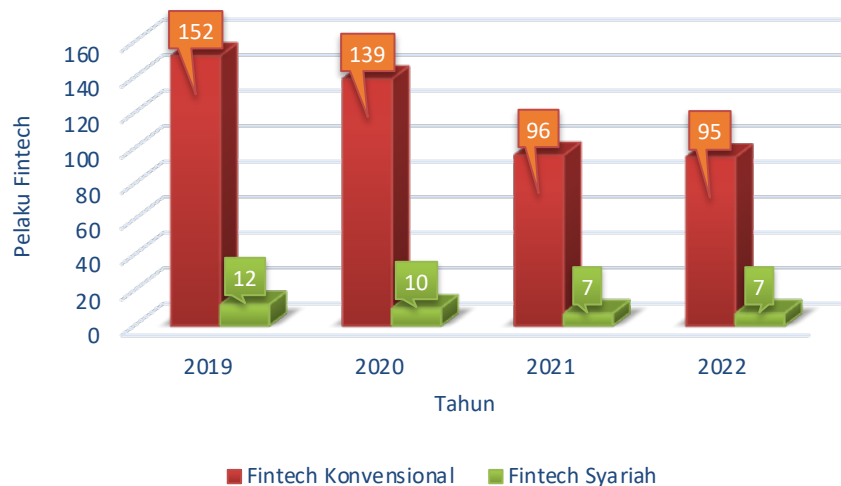
Di Indonesia, fintech syariah mulai mengalami tren kenaikan aset yang pesat pada tahun 2019 ke 2020 (dari 0,05 menjadi 0,07 triliun rupiah) dan kenaikan aset juga terjadi pada tahun 2021 ke 2022 dengan jumlah aset dari 0,07 menjadi 0,13 triliun rupiah (Gambar 2.3.5). Namun, jumlah pelaku fintech syariah mengalami penurunan dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fintech konvensional (Gambar 2.3.6).

Gambar 2.3.5 Perkembangan Aset Fintech Syariah periode Desember 2019 – 2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.3.6 Jumlah Pelaku Fintech Periode Desember 2019 – 2022



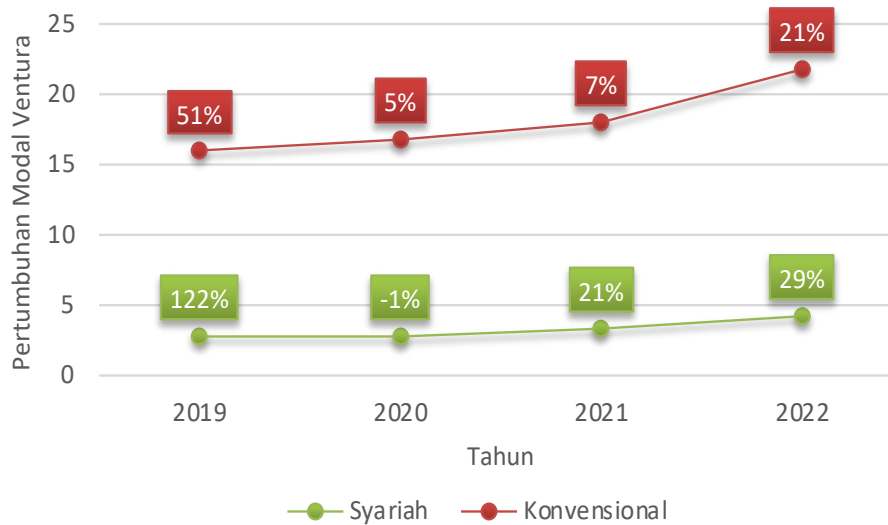
Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura (PMV) Syariah

Perusahaan Modal Ventura (PMV) merupakan lembaga yang melakukan pembiayaan dengan karakteristik risk capital, yang berarti penyertaan modal kepada usaha yang memiliki risiko tinggi akibat tidak adanya jaminan dalam jangka waktu menengah sampai panjang (PEBS, 2022). Aset modal ventura Syariah stabil mengalami pertumbuhan sejak

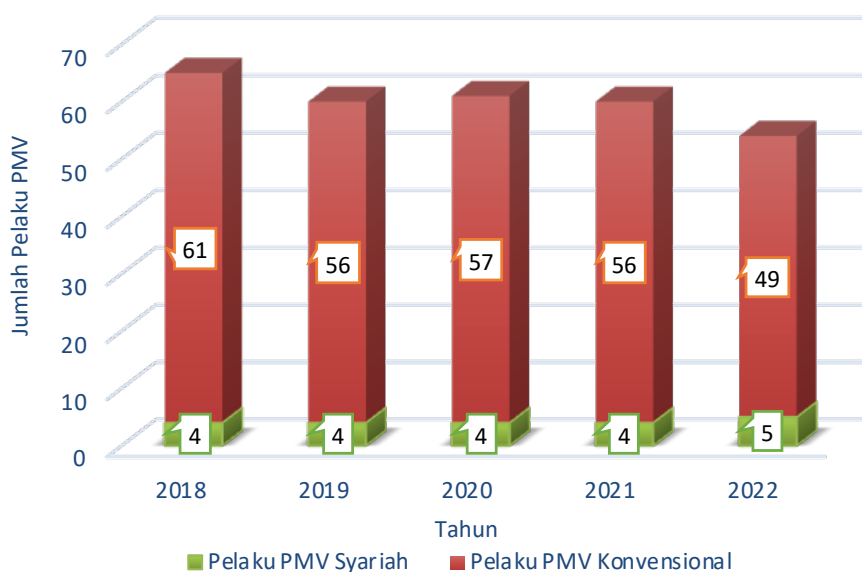
tahun 2018 (Gambar 2.3.7), tetapi pelaku tidak berubah banyak (Gambar 2.3.8).

Gambar 2.3.7 Pertumbuhan Aset Modal Ventura Periode Desember 2018 – 2022



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 2.3.8 Jumlah Pelaku Modal Ventura Periode Desember 2018 – 2022



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Perkembangan Keuangan Haji

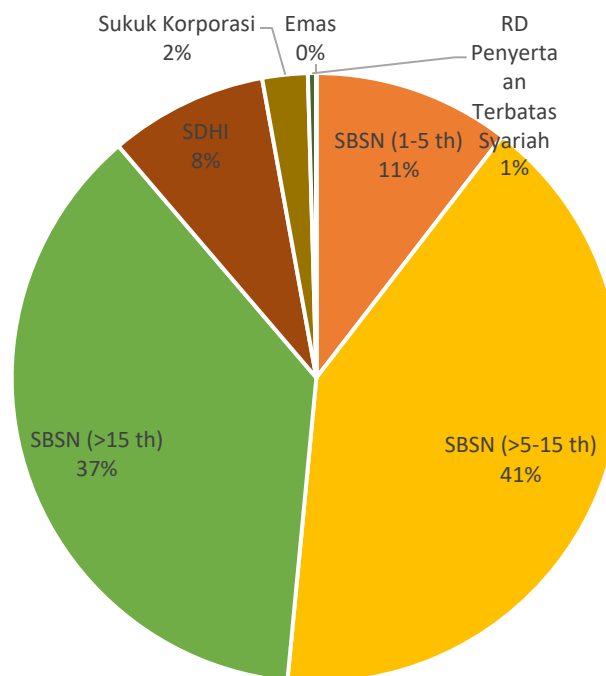
Sementara itu, sektor keuangan haji saat ini juga sangat menarik untuk diperhatikan. Walaupun berupa pengelolaan dana umat (iuran calon jamaah), namun secara teknikal sektor ini memiliki peran besar dalam sektor keuangan. Selain jumlah dana kelolaannya yang akan semakin besar, sistem pengelolaan dan tanggung jawabnya yang semakin kompleks di masa yang akan datang juga dapat menjadi potensi yang besar, baik secara kelolaan saat ini maupun dalam jangka panjang.

Dana yang dikelola BPKH merupakan pokok iuran yang akan menjadi biaya penutup pelaksanaan ibadah haji jamaah. Besaran iuran yang disetorkan ini harus dikelola untuk mendapatkan nilai manfaat sebagai dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan haji. Hal ini dikarenakan besaran iuran yang disetorkan

jamaah pada dasarnya lebih rendah dari biaya riil pelaksanaan ibadah haji. Selain terkait dengan misi operasional, pengelolaan keuangan haji di sisi lain juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Kelolaan dana dapat menjadi motor penggerak ekonomi jangka panjang apalagi ditambah dengan antrian jamaah haji yang dari ke hari ke hari semakin membludak. Dilihat dari tahun ke tahun kelolaan dana haji BPKH selalu melampaui target.

Pada tahun 2022, besaran dana yang dikelola BPKH mencapai Rp166 triliun, di mana lebih tinggi dari target sebesar Rp155 triliun. Dari segi pengelolaan, data per Oktober 2022 menunjukkan sebanyak Rp112 triliun dalam bentuk portfolio investasi dan sisanya dalam bentuk penempatan langsung. Portfolio investasi BPKH per Oktober 2022 tersaji pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3.9 Portfolio Investasi Dana Haji



Sumber: diolah dari data BPKH

Portfolio Investasi BPKH per Oktober sudah masuk ke beberapa instrument seperti SBSN, Sukuk Korporasi, SDHI, RDPT Syariah UMKM dan Emas. BPKH juga merempatkan dana di Bank Muamalat (*Bank Muamalat Private Placement (NON-LISTED) Securities*). Dari daftar portfolio, BPKH juga masuk ke pembiayaan untuk UMKM seperti RDPT Syariah.

Meskipun pada tahun 2022 return investasi dana kelolaan mengalami penurunan dari 6,88% ke 6,28%, namun dari sisi rasio kecukupan dana atau solvabilitas, BPKH mencatatkan kinerja yang cukup baik, di mana pada tahun 2022 nilainya adalah 102,74%. Selain itu, BPKH juga mencatatkan tingkat likuiditas wajib yang baik, di mana nilainya adalah 2,2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Peluang

Dari sektor asuransi syariah, insurtech memiliki potensi yang besar seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Strategi marketing digital penting dilakukan secara masif agar meningkatkan dan mengembangkan penggunaan *insurtech*.

Dari sisi penyedia dana retail, penduduk Indonesia yang banyak dan di umur produktif menjadi peluang tersendiri untuk pengembangan fintech syariah. Karakteristik gen z dan millennial yang adaptif dengan teknologi juga membantu pengembangan fintech di Indonesia. Dari sisi penyedia dana korporasi, bank syariah melakukan *fund channeling* pembiayaan ke UMKM melalui fintech. Dari sisi penerima dana, UMKM masih memiliki pasar yang begitu besar untuk menjadi pengguna fintech. Di samping itu, perkembangan teknologi menumbuhkan *start-up* dan UMKM sehingga banyak diantara mereka yang membutuhkan pendanaan dan bimbingan yang sangat sesuai dengan konsep PMV Syariah.

Sementara itu, pada sektor keuangan haji, dengan semakin besarnya minat masyarakat

terhadap ibadah haji, maka harusnya akan memberikan tambahan pokok dana kelolaan yang *sustainable* bagi BPKH. Selain itu berbagai portfolio investasi yang semakin berkembang juga akan menjadi alternatif pengelolaan investasi yang lebih optimal dalam mendapatkan nilai manfaat yang lebih baik.

Tantangan

Beberapa hambatan dan tantangan dalam mengembangkan produk IKNB syariah diantaranya minimnya literasi masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, minimnya inovasi produk, minimnya sumber daya manusia yang terampil, serta masih minimnya perusahaan teknologi berbasis syariah. Di samping itu, banyak perusahaan PMV memilih menempatkan kantor pusatnya di luar Indonesia karena tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia dan ketidakpastian terhadap tingkat bunga. Iklim tingkat suku bunga yang tidak pasti akan mengakibatkan minimnya sumber pendanaan dan *angel investor*.

Dari sisi pengembangan fintech, ancaman keamanan data pribadi menjadi hambatan masyarakat kurang terisnetif untuk menggunakan fintech. Selain itu, sumber daya manusia masih kurang mumpuni dan modal untuk pengembangan fintech syariah sendiri masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil survei laporan *Financial Innovation Report (2022)*, beberapa responden menjawab bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan fintech syariah secara global tahun 2022, yaitu terkait akses untuk modal, diikuti dengan hambatan dari regulasi di masing-masing negara serta kesadaran terhadap keuangan syariah. Sebanyak 11% responden juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Islam juga menjadi salah satu tantangannya.

Dari sektor keuangan haji, dinamika biaya haji di masa akan datang sulit diprediksi dan sangat mungkin sekali mengalami kenaikan, maka BPKH juga harus menyiapkan berbagai

strategi pengelolaan dana yang tepat agar dapat memberikan solusi dalam menambal kekurangan biaya haji dari iuran calon jamaah.

Ekspektasi ke Depan

Industri IKNB Syariah akan terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat untuk lebih mengutamakan tabungan dan investasi seharusnya dapat meningkatkan pangsa pasar yang potensial, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara masif, serta adanya pemodal yang optimal untuk peningkatan pangsa pasar.

Dari sisi lembaga modal ventura syariah, pertumbuhan modal ventura syariah beberapa kali melampaui pertumbuhan modal ventura konvensional khususnya selama pandemi. Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah *start up* di Indonesia akibat dampak pandemi yang sempat mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja di perusahaannya karena penurunan omset. Di samping itu, dampak pandemi memicu pergeseran perspektif masyarakat terhadap keuangan ke arah yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Dari sisi fintech syariah, dorongan pertumbuhan yang tinggi, salah satunya disebabkan oleh bentuk demografi populasi muslim saat ini yang didominasi generasi millennial. Hal itu karena generasi millennial saat ini sudah beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan masa kini sehingga menumbuhkan penggunaan fintech dalam berbagai aspek kehidupan termasuk fintech syariah. Ekspektasi kedepannya, fintech syariah dapat memiliki inovasi model bisnis yang tepat sasaran dan modal yang kuat untuk bersaing.

Pada sektor keuangan haji, kedepannya BPKH diprediksi akan tetap meningkatkan diversifikasi pada investasi Dana Haji yang tidak hanya meningkatkan dampak ekonomi tetapi sosial, dengan meningkatkan alokasi

dana haji untuk pembiayaan UMKM melalui penempatan dana pada PT. PNM dan connectivity impact investment. Selain itu investasi emas juga akan meningkat. Diversifikasi tersebut diperkirakan akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia dan dampak sosial yang lebih optimal. Dengan besarnya nilai dana haji yang dikelola BPKH, nilai manfaat dana haji diprediksi akan meningkat di tahun 2023. Salah satunya melalui profiling investasi sehingga keamanan dana haji dan nilai manfaatnya lebih terjamin. Untuk proses optimalisasi pengelolaan yang lebih baik, BPKH juga diharapkan untuk melakukan investasi yang bersifat jangka panjang dan berkaitan langsung dengan ibadah haji seperti investasi langsung untuk pembangunan hotel di Makkah/Madinah. Selain untuk pengembalian yang lebih berkelanjutan juga dalam rangka mengurangi biaya pelaksanaan haji secara operasional.

Rekomendasi

Rekomendasi dalam rangka meningkatkan IKNB syariah di Indonesia, yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah, peningkatan diversifikasi produk, peningkatan assessment manajemen resiko yang baik, terciptanya inovasi untuk menarik demand dari masyarakat, meningkatkan sinergi antar pelaku di ekosistem ekonomi syariah, misalnya bersinergi dan berkolaborasi dengan keuangan sosial, serta mengembangkan ekosistem bisnis digital syariah dan kolaborasi antar institusi berbasis digital.

Khusus untuk Perusahaan Modal Ventura (PMV), diperlukan adanya penyusunan *roadmap* pengembangan dan pedoman pelaksanaan PMV sebagai paduan *stakeholders* terutama untuk pemain baru. Selain itu, kemudahan izin bagi peka PMV menjadi suatu insentif sehingga menumbuhkan jumlah pelaku PMV. Dalam jangka panjang, kemudahan pajak, seperti pajak, PPN, PPh, dan dividen juga menjadi insentif materiil yang mendorong praktik skema bagi hasil. Bantuan modal juga diperlukan dalam mendukung

ketahanan pelaku PMV syariah. Dukungan dari pemerintah yang berfokus pada PMV syariah juga perlu dilakukan, seperti misalnya di negara Malaysia dan Arab Saudi yang sudah berhasil mendirikan PMV syariah di bawah sistem pemerintahannya.

Dari sisi fintech, rekomendasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan kemudahan izin sebagai insentif pertumbuhan jumlah pelaku fintech syariah di Indonesia. *Regulatory sandbox*, dimana perusahaan fintech akan didampingi oleh pemerintah baik secara administrasi maupun sistem operasional juga dibutuhkan agar tindakan pelanggaran dapat dihindari. Lembaga akselerator untuk membina dan memberikan edukasi bagi pelaku fintech syariah juga akan turut membantu peningkatan inovasi pelaku fintech. Jaminan keamanan dan privasi perlu diperkuat oleh pelaku fintech untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kemudian, dana haji yang mengendap sangat mungkin untuk dikelola secara optimal oleh pemerintah karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Dana haji akan lebih optimal jika diinvestasikan pada berbagai instrumen sehingga perlu ada batasan dan panduan untuk alokasi investasi. Terdapat tiga isu penting pengelolaan dana haji, yaitu investasi, risiko, dan sustainability dana haji. Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dana haji seperti mix policy antara kuota haji dan persenan financial assistance biaya haji, switching mechanism untuk memangkas waktu tunggu, revisi regulasi untuk mendukung kinerja investasi BPKH, efisiensi struktur biaya haji agar lebih terjangkau oleh masyarakat, dan tentunya penguatan *governance* BPKH dalam mengelola dana haji.



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

PEBS FEB UI



Klaster Keuangan Sosial Islam



2023

44

✉ salam@pebs-febui.org

[f](#) [y](#) PEBS FEB UI

[i](#) [in](#) [pebsfebui](#)

Klaster Keuangan Sosial Islam

Kondisi Terkini

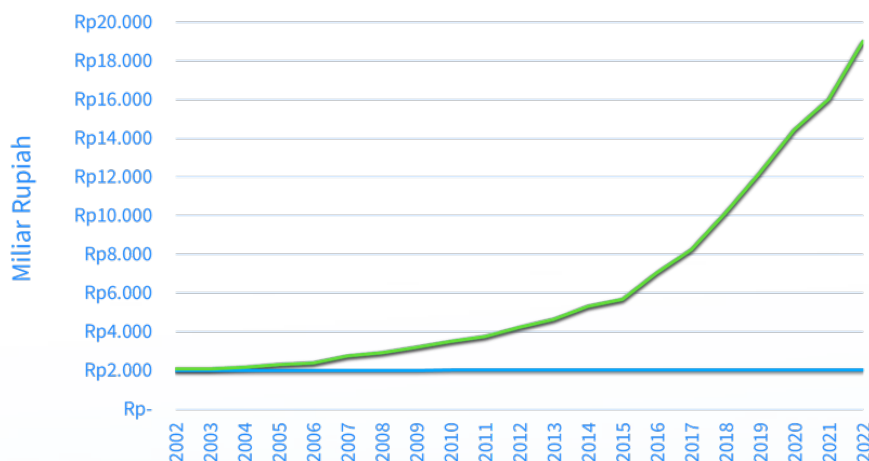
Dalam beberapa tahun terakhir peran sektor keuangan sosial islam semakin kuat, baik dalam sistem keuangan islam maupun keuangannasional. Dua tumpuan utama sektor keuangan sosial islam adalah Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) dan Wakaf selain Keuangan Mikro Syariah (KMS) yang juga semakin memperlihatkan peran dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk masyarakat dengan tingkat *feasibility* dan bankability yang masih rendah. Secara umum ketiga sektor ini dalam keuangan sosial islam memiliki peran yang berbeda namun saling terintegrasi untuk membentuk sistem keuangan sosial yang kokoh.

Berbicara tentang ZIS dan wakaf, kedua sektor keuangan sosial ini memegang dua peran penting dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara makro. ZIS di

satu sisi berperan sebagai pendorong tingkat konsumsi mustahik, sementara wakaf di sisi lain diharapkan mampu menjadi penarik dari sisi investasi dan tingkat produktivitas masyarakat. Sementara itu KMS di sisi yang berbeda memberikan peluang akses pembiayaan yang lebih mudah dan lebih dekat ke masyarakat kecil. Ketiga sektor ini dari tahun-tahun menunjukkan perkembangan yang positif.

Untuk ZIS, data dari tahun 2002 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada jumlah ZIS yang dikumpulkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 sendiri, hingga bulan September 2022 jumlah ZIS yang sudah terkumpul mencapai Rp22,87 triliun dimana sudah melampaui jumlah pengumpulan ZIS tahun sebelumnya.

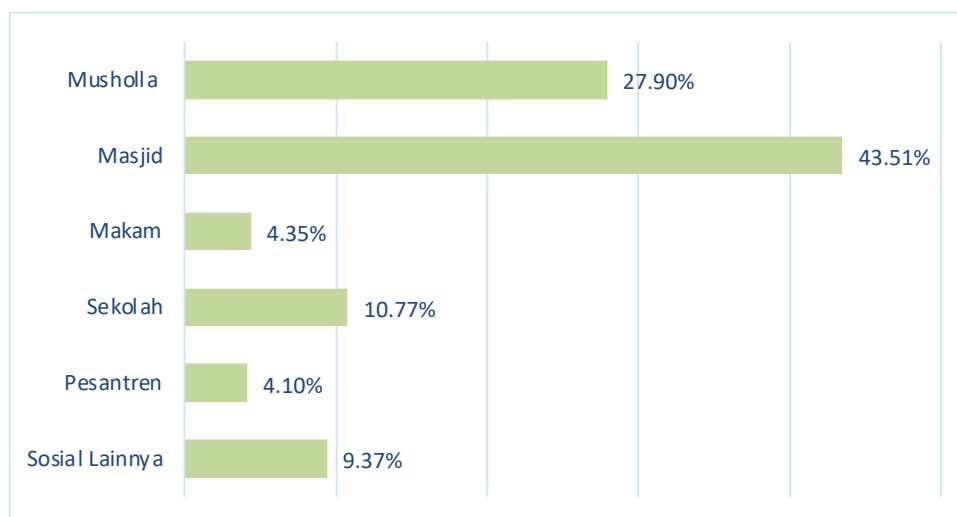
Gambar 3.1 Pengumpulan ZIS Periode Januari 2022–September 2022



• Pengumpulan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) terus mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai Rp 17 triliun per September 2022)

Sumber: diolah dari data Outlook Baznas (2022)

Gambar 3.2 Persentase Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber:diolah dari data SIWAK Kementerian Agama (2022)

Gambar 3.3 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf, serta Persentase Tanah Wakaf Bersertifikat

Jumlah Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf	Tanah Wakaf Bersertifikat
440.512 Lokasi	57.263 Ha	57.42%

Sumber:diolah dari data SIWAK Kementerian Agama (2022)

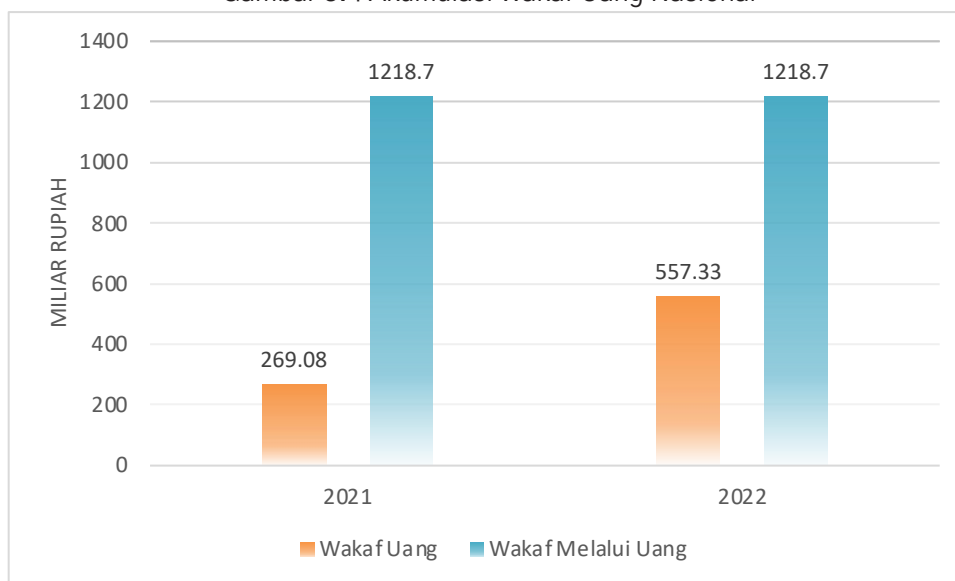
Sementara itu untuk wakaf harta tidak bergerak (tanah) hingga September 2023 berjumlah sebanyak 57.263 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi dimana 57,42% sudah dalam bentuk tanah wakaf bersertifikat.

Sementara itu untuk wakaf uang hingga pertengahan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan adanya tambahan CWLS SW 002 dan SWR 003 dengan jumlah hampir mencapai 90 milyar. Selain itu juga terdapat kolaborasi BWI dengan dana abadi IPB sebesar 200 M. Secara angka jumlah ini tentunya masih jauh dari potensi yang dimiliki oleh wakaf uang. Sedangkan untuk wakaf melalui uang masih tercatat sama dengan

tahun sebelumnya karena belum adanya update terkait hal ini. Dari segi kelembagaan, terdapat 311 lembaga yang terdaftar sebagai Nazir Wakaf Uang dan 33 Bank Syariah yang menjadi LKS-PWU.

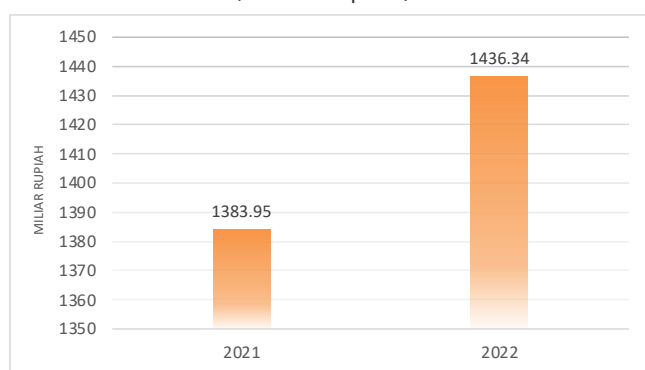
Sektor KMS juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hingga Agustus 2022 total aset keuangan mikro Syariah berjumlah 1436,34 Miliar rupiah, naik sekitar 53 milyar rupiah dengan jumlah pelaku keuangan mikro sebanyak 81 lembaga.

Gambar 3.4 Akumulasi Wakaf Uang Nasional



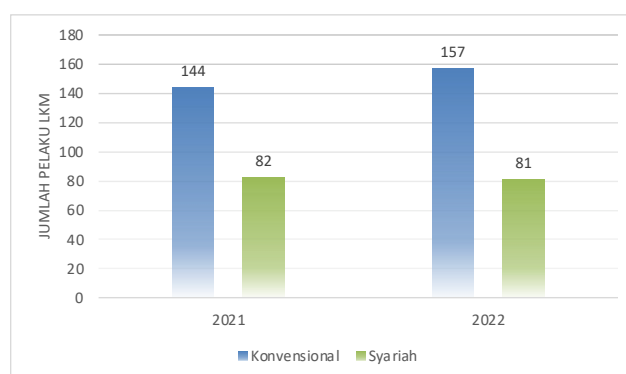
Sumber: diolah dari data BWI dan Berbagai Sumber (2022)

Gambar 3.5 Total Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah Periode Desember 2021–Agustus 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 3.6 Perbandingan Jumlah Pelaku UKM Syariah dan Konvensional



Sumber: diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Perkembangan ketiga sektor ini masih sangat mungkin dan berpotensi besar untuk ditingkatkan. Jika berkaca dari hitungan potensi, baik zakat maupun wakaf yang ada, tentu nilai realisasi ini masih sangat jauh dari nilai potensi yang banyak digambarkan. Selain terkait dengan optimalisasi pengumpulan, secara metode perhitungan potensi yang sudah dilakukan, mungkin juga perlu disesuaikan dengan beberapa asumsi yang lebih realistis dan kontekstual.

Terdapat beberapa isu yang saat ini perlu menjadi perhatian terkait perkembangan sektor keuangan sosial Islam. Untuk zakat sendiri, isu pertama terkait dengan dukungan, fasilitasi dan kolaborasi pemerintah daerah

dan organisasi pengelola zakat. Kedua terkait dengan pengembangan tata kelola zakat yang lebih baik. Sementara itu untuk wakaf yang saat ini menjadi beberapa isu adalah terkait instrument pembiayaan komersial melalui sukuk untuk memproduksi aset wakaf. Selain itu kebutuhan akan lembaga penjaminan pembiayaan dan pengembangan aset wakaf juga perlu mendapat perhatian khusus serta yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pembahasan urgensi revisi UU wakaf dalam rangka penyesuaian kebutuhan ekosistem.

Terdapat beberapa isu terkait integrasi produk keuangan sosial Syariah dan komersial Syariah serta sinkronisasi kebijakan dana sosial

dan RUU P2SK, yaitu Dukungan, fasilitasi dan kolaborasi pemerintah daerah dan organisasi pengelola zakat, Pengembangan tata kelola zakat yang lebih baik, Instrumen pembiayaan komersial melalui sukuk untuk memproduksi aset wakaf, Kebutuhan akan Lembaga Penjaminan Pembiayaan dan Pengembangan Aset Wakaf, Integrasi produk keuangan sosial dan komersial Syariah, Kolaborasi zakat dan wakaf sangat dibutuhkan dalam *project-project* pendayagunaan, Urgensi Revisi UU Wakaf dalam rangka penyesuaian kebutuhan ekosistem, Sinkronisasi Kebijakan Dana Sosial dan RUU P2SK, dan Kebutuhan Pembiayaan UMKM

Peluang

Peluang pengembangan sektor keuangan sosial Syariah semakin menjanjikan kedepannya dengan beberapa argumentasi. Pertama terkait dengan dampak positif dari adanya pandemi. Pandemi Covid-19 walaupun di satu sisi memberikan tamparan yang cukup keras terhadap perekonomian tetapi di sisi lain memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang diperkirakan akan memberikan dampak pada kegiatan ekonomi secara umum termasuk kebiasaan dalam berdonasi dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Setelah adanya pandemi diperkirakan terjadinya peningkatan pada semangat berderma dan membuat masyarakat menjadi lebih religious. Perubahan perilaku ini akan memberikan dampak yang positif seharusnya terhadap perkembangan sektor dana sosial yang salah satunya didorong dari rasa empati dan *pro-social* yang ada dalam masyarakat.

Selain itu secara konteks, karakteristik dasar yang dimiliki Indonesia juga mendukung terhadap peluang pengembangan sektor dana sosial. Selain sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Secara perkembangan Indonesia juga merupakan inisiator dari zakat dan wakaf *core principles*. Dari sisi keuangan mikro Syariah, Indonesia juga memiliki lembaga/institusi yang menyebar secara luas

di seluruh pelosok negeri. Di mana untuk BMT saja terdapat lebih dari 5000 BMT yang ada di Indonesia.

Tantangan

Terlepas dari peluang pengembangan yang besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dengan baik. Secara umum baik untuk ZIS, Wakaf dan KMS terdapat 4 aspek utama yang perlu disorot dan dibenahi dalam rangka pengembangan masing-masing sektor yaitu terkait awareness, pendayagunaan dan teknologi, sumber daya manusia serta regulasi dan kelembagaan. Detail masing-masing tantangan untuk ketiga sektor tersebut tersaji dalam gambar dibawah.

Masalah utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan sosial Islam yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, yaitu tingkat awareness dan literasi masyarakat yang masih rendah. Di samping itu, pemanfaatan teknologi yang belum optimal dan belum meratanya penetrasi internet juga menjadi salah satu tantangan besar di masa ini. Seharusnya, perkembangan teknologi modern saat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat efisiensi dan menjadikan lembaga keuangan mikro syariah lebih inklusif agar dapat berdampak luas ke masyarakat. Di sisi lain, juga terdapat keterbatasan serta belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Penguatan regulasi terkait pengelolaan zakat juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi zakat. Tantangan lainnya terkait regulasi, yaitu perlunya penyempurnaan UU wakaf dan positioning Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta masih terbatasnya aturan pendukung dan *privilage* untuk mengelola dana pemerintah (UMi) di lembaga keuangan mikro Islam.

Ekspektasi ke Depan

Informasi dari BAZNAS menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang mencakup dana

kurban) sudah mencapai Rp22.87 T per September 2022, yang sudah melampaui angka pengumpulan 2022. Diperkirakan trend positif ini akan berlanjut pada tahun 2023, di mana angka pengumpulan ZIS diprediksi akan melebihi pengumpulan di tahun 2022 yang berkisar antara 24 –30 T rupiah.

Perubahan perilaku masyarakat, digitalisasi, perbaikan infrastruktur, inovasi, keterlibatan institusi yang makin meluas dan integrasi kegiatan dana sosial islam, baik dengan sesama dana sosial, antar sektor di ekonomi syariah, dan ekonomi nasional akan membuat perkembangan dana sosial terkhusus wakaf akan semakin tumbuh di masa depan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga diprediksi akan tumbuh dalam kisaran 4 – 5% seiring dengan semakin banyaknya jumlah BMT dan Lembaga keuangan Syariah dan meningkatnya akses masyarakat terhadap institusi keuangan. Sektor Keuangan sosial islam terutama Wakaf akan menjadi motor penggerak dalam berlangsungnya wacana terkait skema *islamic blended financing*. Selain itu integrasi antara zakat dan wakaf dalam mencapai pembangunan juga akan semakin baik seiring dengan sumber informasi, pendataan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait. Secara umum peran sektor keuangan sosial syariah kedepannya akan diprediksi semakin besar dalam membangun perekonomian nasional.

Rekomendasi

Strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan realisasi zakat, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan menggencarkan sistem zakat yang berbasis digital secara masif. Kelembagaan BAZNAS tingkat daerah juga perlu di perkuat untuk agar pengembangan zakat dapat lebih inklusif. Lembaga zakat juga dapat menciptakan inovasi program atau produk penyaluran zakat yang berbasis *qardhul hasan* (pinjaman yang bersifat sosial sehingga peminjam tidak harus memberikan imbal jasa/bunga).

Di samping itu, juga dibutuhkan penguatan administrasi melalui saluran ‘informal’ untuk merekam praktik zakat di masyarakat secara lebih utuh.

Sementara itu, strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan praktik wakaf adalah dengan meningkatkan profesionalisme nazhir yang terdiri dari tiga aspek (profesi, pengelolaan aset, dan standarisasi kompetensi nazhir). Sosialisasi secara menyeluruh dan masif juga penting dilakukan untuk meningkatkan awareness dan literasi masyarakat terhadap praktik wakaf. Pengelolaan tanah wakaf dan wakaf uang juga perlu di optimalkan sebagai wakaf produktif karena memiliki implikasi yang lebih besar dalam jangka panjang. Terakhir, perlunya optimalisasi kelembagaan wakaf yang lebih jelas antar *stakeholders*.

Strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro Islam, yaitu juga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi masa ini untuk menyediakan layanan berbasis digital. Akselerasi digital yang dilakukan akan menekan biaya operasional lembaga keuangan mikro sehingga menjadi lebih efisien. Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM untuk mengelola keuangan dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada SDM. Di sisi lain, peran BMT harus di maksimalkan untuk memberikan layanan bagi masyarakat *unbankable* (masyarakat yang sulit mendapatkan akses ke perbankan karena tidak mampu memenuhi persyaratan di bank). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran BMT, yaitu dengan memberikan legalisasi di beberapa BMT serta mewujudkan APEX BMT. Tata kelola lembaga keuangan mikro syariah juga perlu diperbaiki dan dirancang dengan optimal.

Selain strategi dan rekomendasi yang tertera di atas, terdapat satu strategi khusus yang diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengoptimalan keuangan sosial islam baik dari segi dampak

yang ditimbulkan serta peningkatan jumlah pengumpulan dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitasnya. Strategi tersebut adalah strategi pengintegrasian sistem keuangan sosial Syariah. Tidak hanya antar sektor di dalamnya tetapi juga dengan sektor keuangan komersial Syariah lainnya.

Semakin banyaknya diskusi dan wacana terkait *Islamic blended financing* merupakan salah satu strategi keuangan Syariah yang secara signifikan didorong oleh potensi yang dimiliki oleh sektor keuangan sosial islam sendiri ketika dikolaborasi dengan instrumen keuangan lainnya.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Oportet

PEBS FEB UI



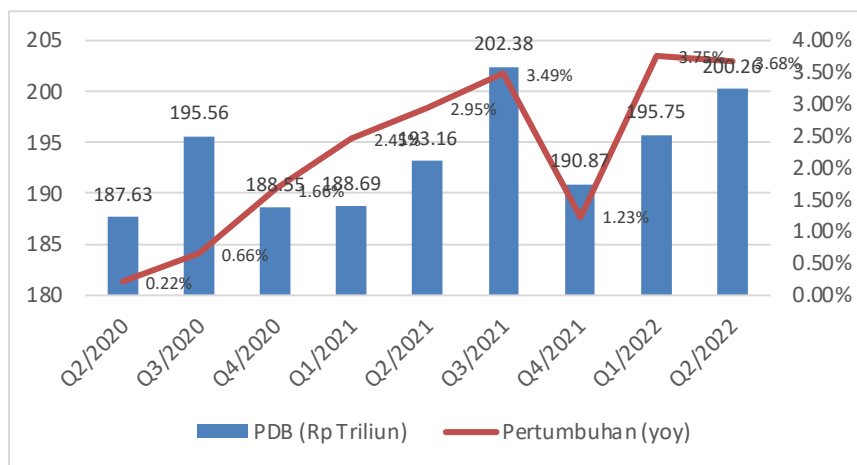
Klaster Industri Halal

Klaster Industri Halal

Kondisi Terkini

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), *produk domestik bruto* (PDB) atas dasar harga secara umum, industri halal di Indonesia mencatatkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini didukung oleh kondisi perekonomian dan pandemi Covid-19 yang semakin membaik, yang mendorong pertumbuhan yang positif bagi industri makanan dan minuman di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) di industri makanan dan minuman adalah sebesar Rp200,26 triliun pada kuartal ke-2 tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 3,68% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp193,16 triliun.

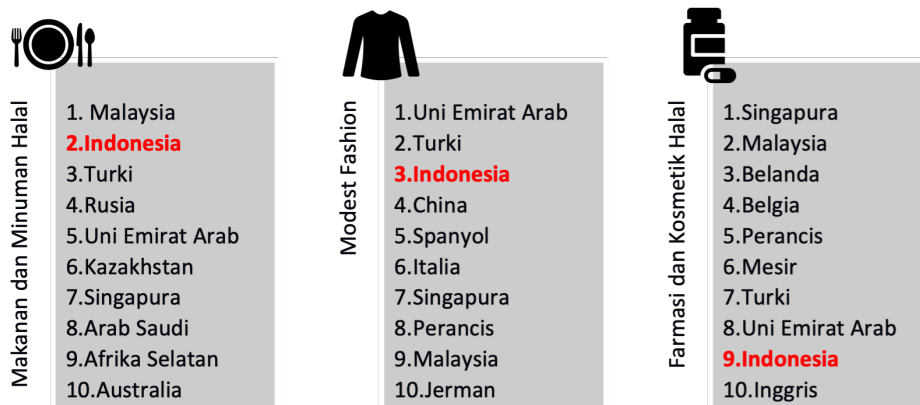
Gambar 4.1 PDB Industri Makanan dan Minuman



Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik (2022)

Sejalan dengan kondisi pertumbuhan industri makanan dan minuman tersebut, sektor makanan dan minuman halal juga mencatatkan performa yang sangat baik, di mana Indonesia menempati peringkat ke-2 pada *State of Global Islamic Economy Report 2022* sebagai negara dengan pasar makanan dan minuman halal terbesar kedua di dunia.

Gambar 4.2 Posisi Sektor Industri Halal Indonesia dalam State of Global Islamic Economy 2022

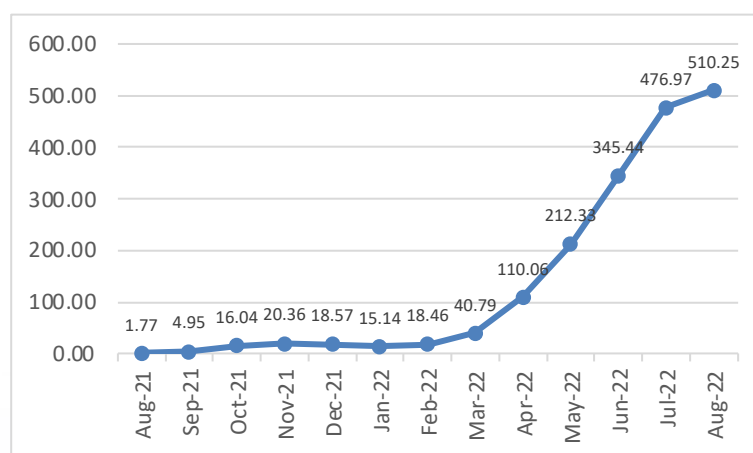


Sumber: diolah dari data State of Global Islamic Economy Report (2022)

Selain itu, sektor modest fashion Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan di mana secara global sektor ini menempati peringkat ke-3 pada tahun 2022 atau naik dari peringkat ke-5 pada periode 2020/2021. Berbeda dengan kedua sektor yang telah disebutkan sebelumnya, sektor farmasi dan kosmetik halal di Indonesia justru mengalami penurunan, yang tadinya menduduki peringkat ke-6 pada periode 2020/2021 turun menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2022.

Pada sektor pariwisata, kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik juga berimplikasi positif terhadap perkembangan sektor ini. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Agustus 2022 mencapai 510,25 ribu kunjungan. Jumlah tersebut naik signifikan sebesar 28.728% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2021 yang hanya berjumlah 1,77 ribu kunjungan.

Gambar 4.3 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara di Pintu Masuk Utama, Agustus 2021–Agustus 2022 (ribu kunjungan)



Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik (2022)

Kemudian, pertumbuhan positif juga terjadi pada sektor pariwisata halal, di mana Indonesia saat ini menempati peringkat ke-2 pada *Global Muslim Travel Index 2022* atau naik dari peringkat ke-4 pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Indonesia berada di bawah Malaysia, namun berada di posisi yang sama dengan dua negara lainnya yaitu Arab Saudi dan Turki. Sementara itu, berdasarkan Laporan Perkembangan Wisata Ramah Muslim Daerah 2019–2020 (KNEKS, 2021), terdapat lima daerah di Indonesia yang memiliki skor tertinggi sebagai daerah wisata ramah Muslim, diantaranya adalah Lombok, Aceh, Jakarta, Sumatera Barat, dan Malang. Dalam hal ini, peringkat tersebut diukur menggunakan parameter ACES (*Access, Communication, Environment, and Services*), di mana hasil penilaian menunjukkan bahwa kelima daerah tersebut memiliki fasilitas ramah muslim yang lebih baik dan memadai jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Selain itu, seperti yang telah diketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu

pasar halal terbesar di dunia. Hal ini tercermin dari nilai pasar konsumen Muslim Indonesia yang terus mengalami peningkatan di seluruh sektor industri halal. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor makanan dan minuman halal yang meningkat dari USD135 miliar pada tahun 2020 menjadi USD146,7 miliar pada tahun 2021. Kemudian, diikuti oleh sektor fashion yang meningkat dari USD15,6 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 20 miliar pada tahun 2021. Meskipun demikian, saat ini nilai impor produk halal di Indonesia masih jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini, nilai impor makanan dan minuman halal di Indonesia mencapai USD17,54 miliar dan menempati peringkat ke-2 secara global, sementara nilai ekspornya hanya USD7,83 miliar. Kemudian, untuk *modest fashion*, Indonesia berada pada peringkat ke-6 dan mencatatkan nilai impor sebesar USD1,24 miliar, sementara nilai ekspornya adalah USD0,39 miliar. Pada sektor kosmetik halal, Indonesia mencatatkan nilai impor sebesar USD1,13 miliar, namun tidak termasuk ke dalam 10 besar secara global untuk nilai ekspornya.

Tabel 4.1 Posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index 2022 dan Lima Daerah Wisata Ramah Muslim di Indonesia

Global Muslim Travel Index 2022			Laporan Pariwisata Ramah Muslim Daerah Indonesia 2021	
Peringkat	Nama Negara	Nilai	Nama Daerah	Skor
1	Malaysia	74	Lombok	4,81
2	Indonesia	70	Aceh	4,47
2	Arab Saudi	70	Jakarta	4,35
2	Turki	70	Sumatera Barat	4,24
5	Uni Emirat Arab	66	Malang	4,12

Sumber: diolah dari data Global Muslim Travel Index (2022); Laporan Pariwisata Ramah Muslim Daerah (2021)

Tabel 4.2 Nilai Ekspor dan Impor Produk Halal Indonesia ke Negara OKI (dalam miliar US Dolar)

Sektor	Ekspor	Peringkat Ekspor	Impor	Peringkat Impor
Makanan dan Minuman Halal	\$7,83	7	\$17,54	2
Modest Fashion	\$0,39	9	\$1,24	6
Kosmetik Halal			\$1,13	4

Sumber: diolah dari data State of Global Islamic Economy Report (2022)

Secara umum, pada konteks perdagangan, ekspor produk halal ke negara tujuan OKI pada Kuartal ke-III tahun 2022 mencapai USD875,4 juta atau tumbuh 18,49% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, dalam konteks pembiayaan, tercatat besaran pembiayaan ekspor syariah UKM adalah Rp973,4 miliar dan penandatanganan MoU dengan Nusantara Fashion House Malaysia senilai Rp68 miliar (KNEKS, 2022).

Dalam Laporan Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal di Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan oleh KNEKS, terdapat 5 strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia yang disingkat dengan GRIPS, yaitu *Global Hub Development Strategy, Research and Regulation strategy, Industrialization strategy, Halal Preference Strategy, dan SME's Development Strategy*. Sampai dengan tahun 2022, implementasi strategi nasional tersebut sudah cukup banyak dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Dalam kaitannya dengan strategi untuk menciptakan Indonesia sebagai Halal Hub dalam produksi dan perdagangan produk halal dunia, berbagai upaya telah dilakukan seperti penajakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang diinisiasi oleh KNEKS dan *Halal Development Corporation Berhad (HDC)*. Sertifikasi produk halal juga semakin gencar dilakukan, dan sampai bulan Oktober 2022, tercatat sebanyak total 749.971 produk telah tersertifikasi halal, meskipun nilai ini masih cukup jauh dari target utamanya yaitu 10 juta sertifikasi produk halal.

Dari sisi kelembagaan, industri halal juga sudah mencatatkan perkembangan yang cukup baik. Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan bahwa sampai dengan periode Desember 2022, terdapat 31 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 156 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan 20.160 Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pada periode yang sama, terdapat total 106.670 permohonan sertifikasi halal melalui program SEHATI dan 35.930 diantaranya telah mendapatkan

sertifikat halal. Selain sertifikasi, pemerintah juga tengah melakukan kodifikasi data industri produk halal untuk mempermudah pelacakan kandungan bahan baku produk serta tercatatnya aktivitas perdagangan produk industri halal.

Dalam kaitannya dengan penguatan riset, pada tahun 2022 Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menginisiasi pembentukan konsorsium riset halal di Indonesia dan memfokuskan pada dua topik utama yaitu deteksi dan autentifikasi halal dan substansi bahan halal. Selain itu, juga terdapat fasilitas riset pangan di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN. Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kemudian, dari sisi industrialisasi, pemerintah juga telah mendorong pembentukan Kawasan Industri Halal sebagai upaya untuk mengintegrasikan rantai pasok halal. Sampai dengan tahun 2022, terdapat tiga kawasan industri halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Dalam kawasan industri halal ini, seluruh aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan, misalnya, dengan menjaga agar tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu, saat ini juga terdapat empat zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) yaitu di Jakarta Selatan, Bukit Tinggi, Bandung, dan Makassar. Saat ini, rumah produksi halal juga telah dikembangkan dan berjumlah 22 pelaku usaha. Dari sisi sumber daya manusia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Universitas Indonesia Halal Center (UIHC) juga bersinergi dalam penguatan SDM di bidang halal.

Sementara itu, dalam konteks preferensi halal, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal dan gaya hidup halal. Kegiatan seperti seminar, talkshow, dan diskusi publik menjadi

salah satu sarana utama yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perkembangan industri halal di Indonesia. Salah satu agenda yang diinisiasi Bank Indonesia yaitu *International Sharia Economy Festival (ISEF)* juga merupakan upaya untuk menyampaikan perkembangan sektor industri halal di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM industri halal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mendorong sinergi program antara pihak terkait untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital melalui "Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat". Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh 4 platform digital yaitu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan LinkAja Syariah. Selain itu, KNEKS bekerja sama dengan 5 Inkubator Bisnis perguruan tinggi (UI, ITB, IPB, Universitas Padjajaran dan Tazkia) dan BSI Corporate University juga telah menyelenggarakan Workshop Uji Materi Ajar 8 Modul Dasar Pembinaan untuk UMKM Industri Halal.

Peluang

Berbagai faktor dan kondisi, baik eksternal maupun internal, yang terjadi hingga saat ini dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sektor industri halal di Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik, transisi perekonomian menuju fase pemulihan, dan berbagai faktor lainnya dapat menjadi peluang yang baik bagi sektor industri halal. Secara umum, peluang yang terdapat di sektor industri halal adalah pertama, Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar, di mana *State of Global Islamic Economy Report* mencatat bahwa pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal mencapai USD184 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 14,96% pada tahun

2025 yaitu USD281,6 miliar atau 11,34% dari pengeluaran halal global. Dalam hal ini, seluruh pemangku kepentingan di sektor industri halal perlu mengupayakan agar Indonesia tidak hanya sekedar menjadi target pasar, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produksi produk halal di dalam negeri.

Kedua, besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri halal, di mana untuk mencapai visi besar Indonesia sebagai pusat halal dunia, pemerintah menaruh perhatian dan mendorong pengembangan industri halal di Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu komitmen yang dilakukan adalah akselerasi implementasi sertifikasi halal termasuk peluncuran Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku UMKM. Pemerintah juga tengah melakukan kodifikasi data industri produk halal agar data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor dan impor serta data industri terintegrasi dengan baik. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Selain itu, Kementerian Perindustrian juga membentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) yang bertugas dalam penyelenggaraan program perancangan regulasi teknis terkait sektor industri dan pemberian fasilitas sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha di kawasan industri halal yang merupakan langkah awal pengembangan KIH terpadu di Indonesia agar seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap. Berbagai kondisi yang telah dilakukan pemerintah merupakan sebuah peluang besar yang perlu dioptimalkan oleh para pelaku industri halal untuk mengembangkan sektor tersebut.

Ketiga, pembentukan KDEKS yang berpotensi mendukung pelaksanaan program strategis industri halal, di mana pada tahun 2022, beberapa provinsi telah menginisiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi

dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai bentuk komitmen dan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional. Pembentukan KDEKS ini menjadi salah satu peluang besar untuk dapat melaksanakan program strategis terkait industri halal. KDEKS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan industri halal secara keseluruhan termasuk dalam hal inkubasi bisnis syariah, percepatan sertifikasi halal, dan ekspor produk halal, serta optimalisasi potensi pariwisata ramah Muslim, pengembangan *modest fashion*, media dan rekreasi halal, serta pengembangan rumah sakit berstandar halal.

Keempat, meningkatnya penggunaan teknologi digital termasuk *e-commerce* dalam mengakses produk halal, di mana pandemi covid-19 yang berlangsung beberapa waktu ini membawa perubahan di tatanan kehidupan masyarakat. Saat ini sedang terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang lebih sering menggunakan platform digital untuk melakukan transaksinya. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebelum pandemi jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 175 juta orang, sementara data terbaru menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Selain itu, pada kuartal pertama tahun 2022, Bank Indonesia mencatat jumlah produk halal yang ditransaksikan di *e-commerce* dan marketplace juga cukup besar, yaitu mencapai Rp10,82 triliun. Angka ini tumbuh 23 persen dari periode yang sama di tahun lalu. Dengan semakin mudahnya akses produk halal melalui platform digital, maka hal tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan positif di sektor industri halal.

Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor industri halal adalah, pertama, kenaikan harga bahan baku akibat dinamika isu global. Pada tahun 2022 harga bahan

baku industri makanan naik hingga mencapai 20% (GAPMMI, 2022). Kondisi ini diduga kuat terjadi akibat adanya isu geopolitik global yang terjadi beberapa waktu ini. Selain bahan baku industri makanan, bahan baku industri tekstil dan pakaian serta bahan baku obat juga turut terdampak akibat isu tersebut yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan menambah biaya logistik yang perlu dikeluarkan. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai impor bahan baku industri pengolahan, termasuk pengolahan makanan dan minuman, adalah lebih dari 60 persen. Serupa dengan hal tersebut, ketergantungan impor bahan baku industri farmasi mencapai sekitar 90 persen dan sekitar 75 persen bahan baku pakaian juga diperoleh dari impor. Ketergantungan atas bahan baku impor ini akan memunculkan isu jaminan kehalalan dari bahan baku tersebut. Hal ini juga menyulitkan pengembangan rantai pasok halal dari hulu ke hilir.

Kedua, keterbatasan substitusi bahan baku non-halal dan material impor. Meskipun riset terkait substitusi bahan baku *non-halal* sudah mulaidilakukan, namun skalaimplementasinya masih sangat terbatas. Sebagai contoh, beberapa riset telah menemukan substitusi gelatin yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri pangan dan pakaian, kini bisa dibuat dari tulang ikan. Namun isu yang terjadi adalah di Indonesia belum berkembang industri gelatin, sehingga sampai saat ini Indonesia belum memproduksi gelatin halal. Kondisi ini merupakan tantangan utama bagi para pelaku industri halal untuk mengupayakan pengembangan produksi bahan baku halal di Indonesia. Hal ini juga perlu menjadi perhatian lebih bagi para pemangku kepentingan terkait agar bisa segera dicari solusinya.

Ketiga, jumlah lembaga penjamin halal, auditor halal, dan penyelia halal yang masih terbatas. Salah satu tantangan yang juga dihadapi oleh sektor industri halal adalah masih terbatasnya jumlah lembaga penjamin

halal, auditor halal, dan penyelia halal. Per Oktober 2022, data dari BPJPH menunjukkan bahwa Indonesia baru memiliki 28 Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi, 344 penyelia halal, dan 497 auditor halal. Dalam kondisi ideal, LPH sebaiknya berada di setiap kabupaten/kota agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, dalam UU JPH disebutkan juga bahwa Lembaga Pemeriksa Halal minimal memiliki tiga Auditor Halal, sehingga total kebutuhan calon Auditor Halal se-Indonesia adalah 1.542 orang.

Keempat, belum banyak tersedia infrastruktur kawasan industri, logistik, & hal pendukung lainnya yang fokus pada pemenuhan kriteria halal. Pemerintah Indonesia saat ini tengah berfokus untuk menciptakan rantai pasok halal untuk produk-produk dari industri halal. Namun, tantangan utama dari tujuan tersebut adalah pengembangan produk halal di Indonesia yang masih belum dilakukan dalam sistem rantai pasok yang menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, pengepakan, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Selain itu, pembangunan kawasan industri halal juga mengalami berbagai tantangan. Berdasarkan informasi dari Deputi III Kantor Staf Presiden, Panutan Sulendrakusuma, beberapa infrastruktur seperti infrastruktur energi dan gas dan instalasi pengolahan limbah B3 belum tersedia. Selain itu, lalu lintas barang antar Free Trade Zone (FTZ) juga cenderung lamban, insentif fiskal juga masih belum menarik bagi investor, dan promosi produk yang belum maksimal. Sementara itu, masih rendahnya literasi mayoritas pelaku logistik halal terkait konsep kehalalan suatu produk, karena mayoritas lebih berorientasi kepada konten kandungannya, namun proses distribusi produk, mulai dari pengiriman bahan mentah kepada pabrikan hingga disalurkan kepada konsumen akhir seringkali dianggap bukan sebagai bagian yang *inheren* dengan produk halal.

Kelima, belum adanya ekosistem dan kebijakan yang komprehensif sehingga menghambat perkembangan industri halal. Meskipun

saat ini sudah ada regulasi yang mengatur tentang produk halal, namun regulasi yang ada dinilai masih belum cukup komprehensif. Sektor pariwisata halal menjadi salah satu sektor yang keberadaannya belum didukung oleh regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa Undang-undang atau Peraturan Menteri, karena saat ini regulasinya berdasarkan pada fatwa DSN-MUI terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah. Selain itu, dari sisi ekosistem, Indonesia saat ini baru memiliki 3 kawasan industri halal dari total 126 kawasan industri yang ada di Indonesia. Indonesia saat ini juga masih belum memiliki peta bagi kerja yang menyeluruh untuk setiap sektor di industri halal. Beberapa kondisi yang telah disebutkan sebelumnya juga menggambarkan bahwa ekosistem industri halal secara keseluruhan masih belum komprehensif, sehingga tantangan ini yang harus segera diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di sektor industri halal.

Keenam, daya saing pelaku dan produk industri halal yang masih terbatas, baik dari sisi keahlian, keberlanjutan, serta kualitas dan kuantitas produksi. Berdasarkan laporan dari *Institute for Management Development (IMD) tentang World Competitiveness Yearbook 2022*, Indonesia menempati peringkat daya saing ke-44 dari 63 negara yang dinilai pada tahun 2022 atau turun dari posisi ke-37 pada tahun sebelumnya. Peningkatan yang dilakukan tersebut melihat kriteria di 4 faktor kinerja keseluruhan yaitu ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kondisi ini juga terjadi pada sektor industri halal, di mana produk pada sektor tersebut masih memiliki daya saing yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Kondisi ini didukung dengan masih rendahnya daya saing ekspor produk halal Indonesia yang masih tertinggal dari beberapa negara lainnya karena sejumlah negara di dunia tidak menerima sertifikasi nasional (Kementerian Perdagangan, 2022).

Ekspektasi ke Depan

Pada tahun 2023 mendatang, seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan berbagai dukungan pemerintah Indonesia untuk sektor industri halal, beberapa proyeksi kedepan untuk sektor industri halal adalah Indonesia berpotensi menambah US\$5,1 miliar atau Rp72,9 triliun per tahun terhadap produk domestik bruto (PDB) dari industri halal (*DinarStandard*, 2022). Selain itu, potensi rata-rata nilai ekspor produk halal ke negara Islam (OKI D-8) diperkirakan mencapai US\$233,12 juta (Marshella, 2023). Dari sisi pembiayaan, pembiayaan perbankan syariah untuk industri halal diperkirakan akan tumbuh sekitar 12,37% YoY (BSI Institute, 2022). Sektor makanan dan minuman halal diperkirakan masih akan mendominasi pada tahun 2023, dan ditargetkan menempati peringkat pertama secara global. Kemudian, potensi adanya “*revenge travelling*” di tahun 2023 juga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata halal serta adanya peluang untuk mengembangkan Halal *Medical Tourism* di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan peluang dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa rekomendasi yang dapat dirumuskan untuk sektor industri halal yang pertama, mampu menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain untuk mengakses bahan baku halal serta mempercepat pengembangan bahan

baku halal. Kedua, mampu mengoptimalkan program SEHATI dan mekanisme *self-declaring* sertifikasi halal dengan meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga, perlunya memperkuat infrastruktur serta ekosistem industri halal dan meningkatkan keterlibatan antar sub-sektor dalam rantai pasok kawasan industri halal.

Selanjutnya, penguatan ekosistem ekspor halal juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi perdagangan produk halal Indonesia. Hal ini perlu didukung juga dengan peningkatan kapasitas, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung untuk pelaku usaha industri halal. Kemudian, penyusunan masterplan industri halal dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga serta integrasinya dengan rencana pembangunan nasional menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan dan di realisasikan.

Seiring berkembangnya teknologi, industri halal juga seharusnya mampu memanfaatkan situasi ini dengan mengadopsi teknologi digital untuk mendukung biaya operasional yang lebih efisien, serta mampu mengoptimalkan produksi yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM. Selain itu, perlu juga adanya upaya peningkatan penggunaan teknologi yang dapat mendukung proses *halal traceability* sehingga dapat memudahkan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk dari hulu ke hilir.



ISEO 2023
INDONESIA SHARIA ECONOMIC OUTLOOK



Klaster Frontier

Klaster Frontier



Kondisi Terkini

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa teknologi *Blockchain* dan *Artificial Intelligence* (AI) telah membuka peluang inovasi dan perkembangan yang masif pada sektor ekonomi dan keuangan termasuk di Indonesia. Blockchain sendiri telah menjadi tulang punggung inovasi seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token (NFT)*, dan *metaverse*. Sedangkan perkembangan AI memungkinkan otomatisasi pada hampir seluruh aspek bisnis, mulai dari perbankan hingga edukasi. Perkembangan sektor ini didorong oleh berbagai aspek termasuk kelebihan likuiditas investor negara maju, kecanggihan teknologi informasi, hingga wabah Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 lalu.

Dari perspektif Syariah, penggunaan teknologi tersebut masih menjadi diskusi para pakar. Banyak yang melihatnya hanya dari sudut pandang fikih saja. Namun tidak sedikit yang juga menganalisa dalam kaitannya dengan tujuan Syariah (*Maqasid Shari'ah*) yang bersumber dari sistem nilai dan etika Islam. Diskusi terkait kehalalan produk-produk

frontier tentu masih dinamis. Perdebatan etika teknologi di antara kalangan yang menyatakan teknologi netral dan teknologi tidak netral juga masih akan terus berlanjut.

Belum kuatnya fikih kontemporer, etika teknologi, dan cenderung mengetatnya likuiditas investor di negara maju menimbulkan pertanyaan akan prospek sektor frontier di dunia dan di Indonesia.

Blockchain

Teknologi *blockchain* merupakan skema penyimpanan data dalam blok dimana satu blok dan lainnya terhubung dalam sebuah rantai yang bersifat konsisten sesuai kronologis sehingga menjamin aspek transparansi dan memudahkan dalam melacak transaksi. Di bidang keuangan, perkembangan blockchain tidak lepas dari aset kripto yang mulai mendapatkan atensi public pada 2008 melalui Bitcoin yang diperkenalkan oleh seseorang yang dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto.

Kapitalisasi pasar mata uang kripto (*cryptocurrency*) sempat mencapai \$3 triliun (Rp45.000 triliun) pada November 2021, namun terkoreksi menjadi \$800 miliar (Rp12.000 triliun) pada akhir tahun 2022. Sebagai perbandingan, nilai PDB Indonesia pada akhir 2021 ‘hanya’ mencapai \$1,2 triliun (Rp18.000 triliun) sedangkan kapitalisasi aset keuangan Syariah di dunia pada periode yang sama mencapai \$3,6 triliun (Rp54.000 triliun).

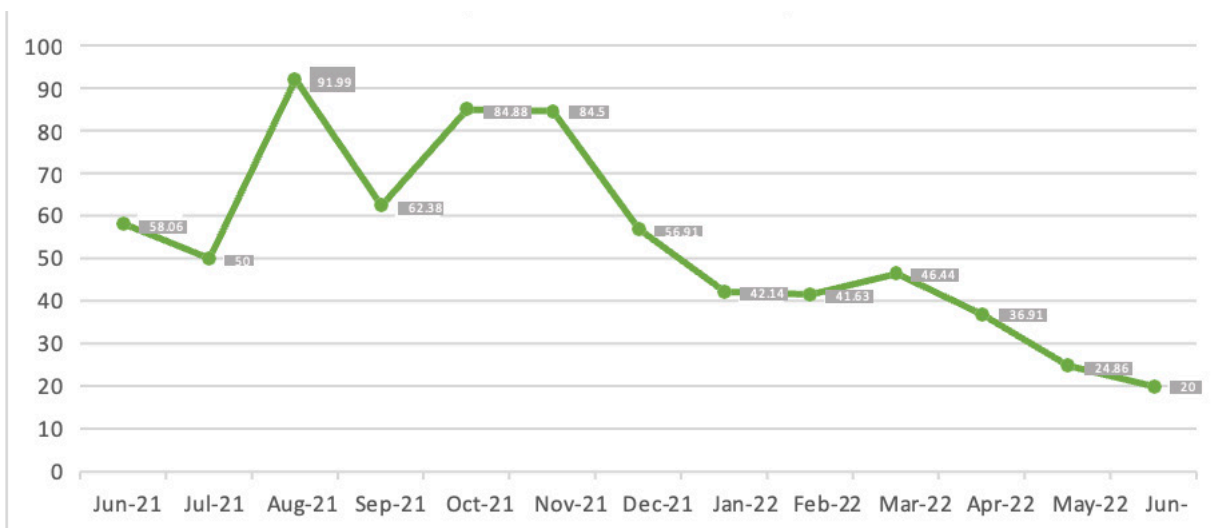
Perdagangan aset kripto makin meningkat juga di Indonesia dari tahun ke tahun. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp859,4 triliun pada 2021. Nilai transaksi aset kripto tersebut meroket 1.222% dibandingkan tahun

Aset kripto tersebut terdiri dari 229 jenis yang diperdagangkan di Indonesia hingga Februari 2022. Termasuk di antaranya *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, hingga *Doge Coin*.

Data BAPPEBTI juga menunjukkan bahwa aset kripto menjadi pilihan aset investasi yang digemari kalangan muda Indonesia. Jumlah investor untuk kripto mencapai 44%, lebih tinggi dibandingkan reksadana sebesar 27% dan saham sebesar 29%. Tercatat, jumlah investor kripto pada Juni 2022 telah mencapai 15,1 juta investor meningkat dari akhir tahun 2020 yang hanya mencapai 4 juta orang. Ini artinya, dalam satu setengah tahun terakhir, jumlah investor kripto sudah naik 277,5%.

Dari segi legal, saat ini Indonesia hanya mengakui mata uang kripto sebagai aset untuk

Gambar 5.1 Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Periode (Juni 2021 – Juni 2022) Triliun Rupiah

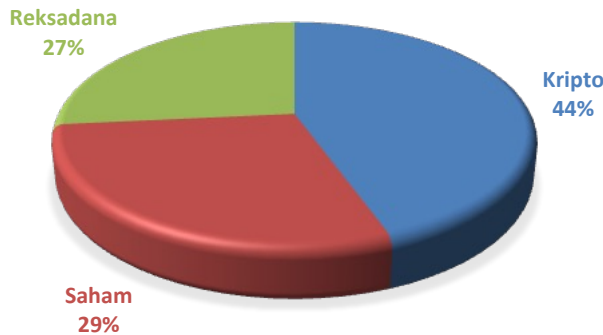


Sumber: diolah dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (2022)

sebelumnya. Laporan Bappebti menunjukkan, rata-rata pertumbuhan nilai transaksi aset kripto mencapai sebesar 16,2% per bulannya sepanjang 2021. Sedangkan, rata-rata nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 2,35 triliun per hari pada tahun lalu. Jumlah transaksi perdagangan kripto selama periode Q1 hingga Q2 2022 telah mencapai Rp 192 triliun.

investasi dan belum dapat digunakan sebagai alat transaksi mensubstitusikan mata uang. MUI juga telah mengeluarkan fatwa pada akhir 2021 menyatakan mata uang kripto halal digunakan sebagai media investasi selama tidak dilakukan dengan cara yang diharamkan Syariah, namun haram digunakan sebagai pengganti mata uang rupiah.

Gambar 5.2 Komposisi Investor berdasarkan Kelas Aset di Indonesia Periode Juni 2021 – Juni 2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: diolah dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (2022)

Masifnya perkembangan aset kripto telah mendorong Bank Indonesia (BI) untuk bergerak lebih cepat meluncurkan Proyek Garuda pada Desember 2022. Proyek Garuda adalah perkembangan dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang telah sukses melahirkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan Bank Indonesia *Fast Payment (BI-FAST)*. Selanjutnya BI secara bertahap akan mengkaji penerapan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* dalam bentuk Digital Rupiah.

Secara teknologi, Digital Rupiah mungkin dapat menggunakan teknologi blockchain yang sama dengan mata uang kripto yang lainnya, sebagaimana yang sedang dikembangkan di negara lain seperti Singapura dan India. Namun secara prinsip, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara CBDC dan mata uang kripto seperti bitcoin. Logika CBDC yang terpusat dan teregulasi tentu bersebrangan dengan prinsip desentralisasi keuangan yang dibawa oleh para pendukung mata uang kripto.

Perkembangan *blockchain* dan mata uang kripto memberikan peluang untuk monetasi metaverse yang memindahkan aktifitas di dunia nyata, termasuk didalamnya adalah transaksi ekonomi, ke dalam ruang virtual. Banyak prediksi menyebutkan bahwa metaverse adalah bisnis masa depan. McKinsey memprediksi nilai kapitalisasi metaverse mencapai \$5 triliun (Rp75.000 triliun) pada tahun 2030. Rebranding Facebook menjadi Meta pada akhir 2021 menjadi indikasi kuat tren penerapan metaverse pada aspek-aspek kehidupan. Kompetitor seperti Microsoft dan Nvidia fokus pada aspek kolaborasi di dunia kerja. Diperkirakan metaverse pada pertemuan kerja akan booming pada 2023-2024.

Gambar 5.3 Tren Metaverse



Sumber: diolah dari data Riset Accenture Technology Vision (2022)

Tren metaverse juga telah mulai merambah bisnis di Indonesia ditandai dengan proyek RanVerse dari Rans Entertainment yang fokus pada lingkungan realitas *virtual*. Beberapa bank besar nasional juga sudah mulai merencanakan membuka layanan dan produknya di metaverse. Bank BUMN besar seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri misalnya sudah mulai menjalin kerjasama membangun metaverse dengan WIR Group, salah satu perusahaan multinasional ASEAN yang fokus pada pengembangan teknologi Metaverse.

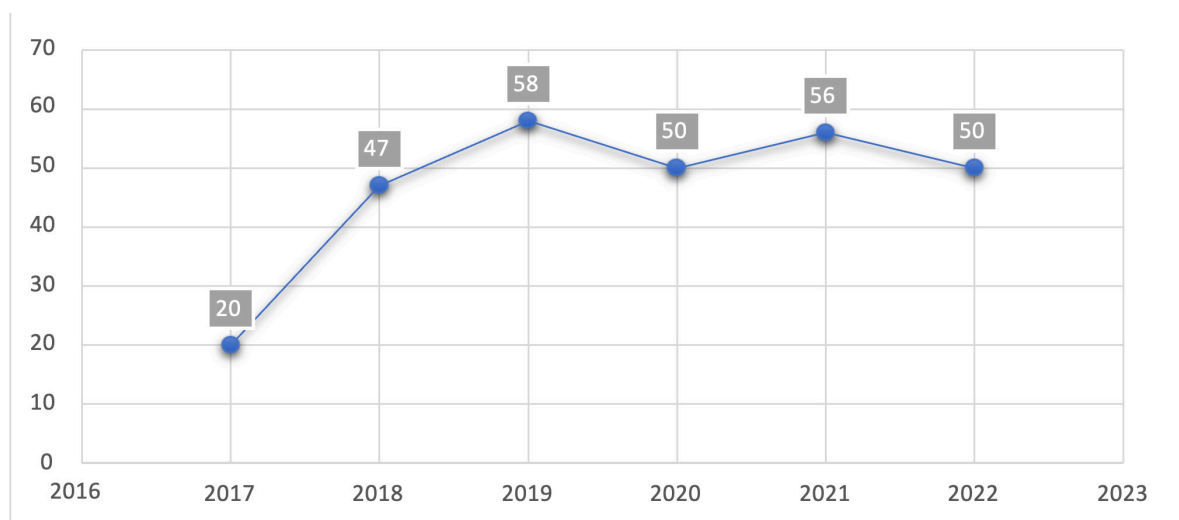
Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) dikembangkan untuk meniru kecerdasan otak manusia dengan kemampuan memproses dan mengambil keputusan berdasarkan input data dalam jumlah yang besar secara holistik. Sebagian ahli membagi evolusi AI menjadi tiga. Dimulai dari (i) *Machine Learning (Artificial Narrow Intelligence atau ANI)*, (ii) *Machine Intelligence (Artificial General Intelligence atau AGI)* hingga (iii) *Machine Consciousness (Artificial Super Intelligence atau ASI)*.

Perbedaan antara ANI dan AGI berada pada kemampuan keduanya dalam memutuskan berdasarkan data. ANI fokus pada satu tugas dan tujuan seperti Siri dari Apple, Alexa dari Amazon dan Contana dari Google. Sedangkan AGI dapat memutuskan problematika yang lebih kompleks sebagaimana otak manusia seperti ChatGPT. Tahap perkembangan AI masih jauh dari ASI, dimana AI kelak benar-benar dapat memiliki *consciousness* sebagaimana manusia.

Survei McKinsey menunjukkan bahwa unit organisasi yang mengadopsi penggunaan AI pada tahun 2022 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017, organisasi yang menggunakan kemampuan AI setidaknya dalam satu unit bisnis mereka sebanyak 20% sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 50% walaupun persentase angka puncak tertingginya berada di tahun 2019 yaitu sebesar 58%.

Gambar 5.4 Porsi Responden yang Mengatakan bahwa Organisasi Mereka Telah Mengadopsi AI Setidaknya dalam Satu Fungsi (%)



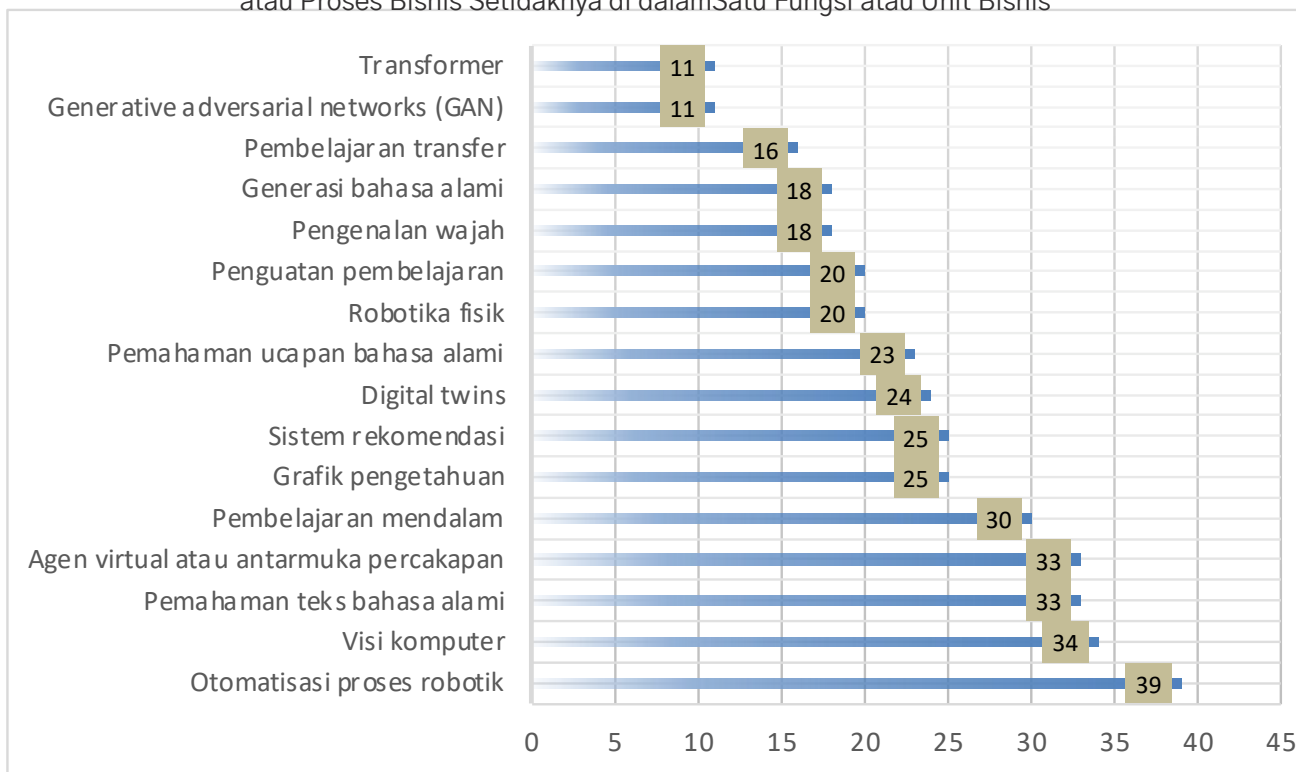
Sumber: diolah dari data The State of AI, McKinsey (2022)

Survei McKinsey juga menunjukkan bahwa teknologi AI yang paling umum digunakan mencakup otomatisasi proses robotik (39%) yang membantu tugas operasional secara terstruktur, asisten virtual atau antarmuka percakapan (33%) untuk divisi layanan pelanggan, dan teknik pembelajaran mesin (30%) untuk mendeteksi penipuan dan mendukung penjaminan emisi dan manajemen risiko. Sementara itu, di beberapa perusahaan jasa keuangan, penggunaan AI dilakukan dalam selang waktu tertentu (episodik) dan lebih berfokus pada penggunaan tertentu (McKinsey, 2022).

dianggap sebagai teknologi dasar yang dapat mentransformasi secara *virtual* setiap sudut layanan keuangan, mulai dari penilaian kredit, interaksi pelanggan, *robot advisor*, riset pasar, dan bahkan deteksi penipuan. Penerapan AI di industri keuangan bisa menyederhanakan dan mempercepat kontak dengan klien serta jauh lebih transparan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemanfaatan AI di perbankan sebagian besar adalah sebagai alat deteksi *fraud*, dan monitoring risiko secara *realtime* atau yang disebut *virtual assistant (CS robot)* sehingga penerapan AI berpotensi untuk meningkatkan kapasitas, inklusivitas, dan keamanan.

Dalam sektor keuangan, AI umumnya

Gambar 5.5 Persentase (%) Responden yang Mengatakan Kemampuan AI yang Tertanam pada Produk atau Proses Bisnis Setidaknya di dalam Satu Fungsi atau Unit Bisnis



Sumber: diolah dari data The State of AI, McKinsey (2022)

Perbankan Syariah di Indonesia juga sudah cukup aktif mengadopsi AI terutama dalam tahap *Machine Learning*. Hal ini diaplikasikan pada mobile banking (*m-banking*) dalam pelayanan jasa keuangannya, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang fokus berinvestasi pada layanan mobile banking terpadunya. Selain itu, beberapa bank syariah juga menempatkan diri sebagai bank digital seperti Bank Aladin Syariah dan Hijra Bank dan juga Bank Jago Syariah.

Peluang

Peluang sektor *frontier* mencakup beberapa hal termasuk biaya teknologi yang relatif semakin murah, bonus demografi Indonesia, dan dukungan pemerintah dan bank sentral. Perkembangan teknologi informasi sangat cepat termasuk perkembangan digitalisasi keuangan dan bisnis didorong oleh relatif lebih mudahnya biaya pengembangan teknologi apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Walaupun perlu diakui bahwa disrupsi rantai pasokan beberapa bulan belakangan juga memengaruhi peningkatan harga teknologi dalam jangka pendek.

Di samping itu, adanya bonus demografi mendukung perkembangan digitalisasi dan angka melek literasi digital karena struktur kalangan Generasi Y dan Z dominan. Mereka adalah generasi yang sangat melek teknologi. Hal itu mendukung tingginya permintaan terhadap sektor-sektor *frontier* yang ada.

Di samping itu, dukungan dari Pemerintah dan Bank Sentral memperkuat implementasi keuangan yang berbasis digital. Proyek Garuda BI menjadi bukti keseriusan otoritas keuangan dalam memajukan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Tantangan

Tantangan sektor *frontier* di antaranya berasal dari aspek permodalan, disparitas literasi dan infrastruktur serta aspek syariah dan etika. Dari segi permodalan, rezim inflasi tinggi di negara-negara maju membuat likuiditas investor yang sebelumnya tinggi dan butuh

disalurkan pada start-up dan financial technology yang membawa inovasi di sektor keuangan menjadi lebih ketat. Sebelum pandemi perkembangan *blockchain* dan AI membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Selama ini stabilitas ekonomi negara-negara maju berefek pada inflasi dan suku bunga rendah. Oleh karena itu, terjadi *flight to higher return* kepada investasi jangka panjang seperti *start-up*.

Namun ketatnya likuiditas yang disebabkan oleh pandemi dan kondisi geo politik yang tidak menentu mendorong para investor baik itu modal ventura dan private equity untuk bukan hanya mengerem pendanaan untuk *start-up* teknologi namun juga menuntut profitabilitas perusahaan tempat mereka berinvestasi. Maka dari itu, tidak mengejutkan apabila ditemukan banyak perusahaan teknologi finansial yang melakukan efisiensi besar-besaran dengan memberhentikan para karyawannya.

Di sisi lain, disparitas pada literasi dan infrastruktur di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan untuk menopang pembangunan berbasis digital yang adil. Hal ini juga berimplikasi pada masih belum optimumnya cybersecurity dan proteksi terhadap data dan nasabah di Indonesia.

Dari sisi Syariah, terdapat tantangan untuk dapat memproduksi fatwa-fatwa yang bukan hanya sebatas atas pertimbangan fikih saja namun juga etika Islam. Maka dari itu, diperlukan pembangunan di sisi teoritis terkait dengan etika teknologi dari perspektif Islam yang universal dan tepat untuk kultur di Indonesia.

Ekspektasi ke Depan

1. Blockchain

Aplikasi *blockchain* akan semakin tersebar. Blockchain memungkinkan penelusuran halal yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada rantai pasokan produk halal. Blockchain juga dapat membantu dalam

pembuatan *platform crowdfunding* wakaf sehingga realisasi pengumpulan dana sosial Islam dapat lebih optimal. Pemanfaatan blockchain dari sisi penerbitan sukuk dapat memperjelas pertanyaan tentang kepemilikan legal dan pengalihan kepemilikan kepada SPV dan Investor.

Selain itu, tren investasi aset kripto diprediksi akan mengarah pada regulasi pemerintah yang lebih ketat untuk mencegah *mismanagement (liquidity crunch)* seperti FTX terulang dan merembet ke sektor lainnya. Rezim inflasi tinggi dapat menjadikan aset kripto lebih menarik bagi mereka yang mencari imbal hasil lebih besar, namun juga meningkatkan *opportunity cost* investasi pendapatan tetap. Tren CBDC semakin konkrit dilakukan walaupun belum akan diterapkan secara masif dalam waktu dekat. Riset terkait dampak CBDC terhadap ekonomi dan kebijakan moneter sangat diperlukan. Termasuk juga dalam kaitannya dengan diskursus fikih CBDC dan implikasinya.

Implementasi konkret Metaverse akan merambah pada kolaborasi dan pertemuan kerja yang akan dimotori oleh Microsoft dan Nvidia. Jaringan dan produk perusahaan tersebut yang tersebar luas, termasuk di Indonesia, menjadikannya sangat mungkin diterapkan di perkantoran paling cepat pada akhir 2023. Perkembangan metaverse juga dapat dimanfaatkan untuk efisiensi layanan keuangan, termasuk oleh perbankan syariah, yang tidak perlu lagi menyediakan kantor cabang untuk melayani nasabah.

2. Artificial Intelligence

Generative AI seperti ChatGPT akan semakin menjamur dan menyempurnakan fase Machine Intelligence. Terlebih Microsoft terus menggelontorkan dananya kepada OpenAI, perusahaan ChatGPT, untuk riset dan pengembangan produk. Google juga baru saja menempatkan dananya pada *Anthropic* yang sedang mengembangkan *chatbox* bernama Claude, alternatif ChatGPT. Mengingat jaringan Microsoft dan Google yang

menjangkau sangat luas, adopsi *Generative AI* di Indonesia diprediksi akan cukup cepat.

Namun demikian untuk AI beranjak dari *Machine Intelligence (AGI)* ke *Machine Consciousness (ASI)* diprediksi belum akan terjadi dalam waktu dekat atau menengah.

Perkembangan Generative AI diprediksi juga akan memberikan angin segar pada pengembangan fatwa AI yang sejak akhir tahun 2019 sudah diperkenalkan di Timur Tengah. Industri keuangan Islam diprediksi dapat memberikan utilisasi teknologi untuk lebih menstandarisasi fatwa dan memberikan literasi lebih kepada calon nasabah terkait produk-produk keuangan Islam.

Rekomendasi

Infrastruktur dan koneksi internet cepat (5G) yang merata menjadi krusial untuk mempercepat proses penggunaan serta efisiensi waktu. Pembangunan yang merata harus menjadi perhatian pemerintah dan otoritas dikarenakan risiko disparitas yang cukup tinggi mengingat masih terpusatnya perekonomian Indonesia di pulau Jawa.

Selain itu, dorongan regulasi diperlukan pada inovasi yang berwawasan etika teknologi. Hal perlu didukung oleh peningkatan sumber daya yang inovatif, literasi digital yang merata, dan penerapan etika teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perguruan tinggi perlu didorong untuk tidak hanya mengajarkan teknologi kepada para mahasiswanya, melainkan mengajarkan juga etika teknologi. Dengan demikian pembangunan teknologi di Indonesia dapat mendorong pembangunan sosial ekonomi yang merata bukan malah sebaliknya.

Termasuk di dalam etika teknologi adalah peningkatan keamanan dari kejahatan *cyber* dan proteksi data para pengguna teknologi. Hal ini diperlukan untuk semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sistem dan industri sehingga semakin meningkatkan penggunaan dan investasi

pada sektor frontier.

Sustainability permodalan dan manajemen risiko juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membuat regulasi yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pendanaan VC dan *private equity* perlu didorong untuk memiliki manajemen risiko yang baik guna menghindari risiko *fraud* seperti yang terjadi baru-baru ini pada FTX.

Penerapan *policy-based research* terkait inovasi keuangan digital termasuk CBDC juga perlu dilakukan. Rupiah digital perlu tetap menjaga privasi masyarakat yang menggunakannya. Sentralisasi dan regulasi CBDC sangat memungkinkan berkumpulnya power dan informasi yang dapat disalahgunakan oleh penjahat cyber maupun oknum bank sentral.

Perkembangan blockchain dan AI juga dapat dimanfaatkan oleh sektor keuangan komersial dan sosial Islam. Dana sosial Islam, misalnya, dapat mengoptimalkan realisasi pengumpulan dana. Kepercayaan terhadap lembaga pengumpul seringkali menjadi isu untuk optimasi keuangan sosial Islam. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *blockchain* dan AI. Walaupun tentunya tantangan besarnya adalah kebutuhan investasi yang tidak kecil. Di samping itu, penggabungan AI dan Blockchain dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan sertifikat halal yang lebih mudah serta efisien. Blockchain akan memberikan catatan transaksi secara real time yang mudah diakses didukung dengan AI yang berfungsi untuk memudahkan evaluasi serta dapat memastikan produk yang telah memenuhi kriteria halal (BRAIN IPB, 2022)

REFERENSI UTAMA

- Accenture. 2022. Accenture Technology Vision 2022. Retrieved from https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-178/Accenture-Tech-Vision-2022-Infographic-Indonesia.pdf
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2022. Outlook BAZNAS 2022.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2022. Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Periode (Juni 2021 - Juni 2022) Triliun Rupiah.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2022. Komposisi Investor berdasarkan Kelas Aset di Indonesia Periode Juni 2021 – Juni 2022 (Triliun Rupiah).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara di Pintu Masuk Utama Agustus 2021- 2022. Retrieved from <https://www.bps.go.id/website/images/Pariwisata-Rilis-Oktober-2022-ind.jpg>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha 2010-2022. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. PDB Industri Makanan dan Minuman Q2-2020 - Q2 2022.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2022. Data Wakaf Uang Nasional.
- Bank Indonesia. 2022. Tingkat Inflasi Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id/en/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute. BSI Sharia Outlook 2023.
- Bloomberg. 2022. Data Penurunan Komoditas Energi Dunia. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/markets/commodities>
- Bloomberg. 2022. Nilai Dolar terhadap Mata Uang Negara Lain. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/quote/USDALL:CUR#xj4y7vzkg>
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B. and Moore, T. (2015), “Bitcoin: economics, technology, and governance”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 29 No. 2, pp. 213-238.
- CrescentRating. 2022. Global Muslim Travel Index 2022.
- D’Acunto, F., Prabhala, N. and Rossi, A.G. (2019), “The promises and pitfalls of robo- advising”, *Review of Financial Studies*, Vol. 32 No. 5, pp. 1983-2020.
- DinarStandard. 2022. State of the Global Islamic Economy Report 2022. Dubai International Financial Centre.
- Goldstein, I., Jiang, W. and Karolyi, G.A. (2019), “To FinTech and beyond”, *Review of Financial Studies*, Vol. 32 No. 5, pp. 1647-1661.
- Indonesia Halal Lifestyle Center dan DinarStandard. 2021. Indonesia Halal Market Report 2021/2022.
- Indonesia Investments. 2022. Trade Balance Indonesia. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/>
- Institute for Supply Management. 2022. ISM Report. Retrieved from <https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/>
- Islamic Finance News. 2022. IFN Financial Innovation Report 2022. Retrieved from <https://www.islamicfinancenews.com/newsletter-issue/ifn-financial-innovation-report-2022>
- Kementerian Agama (Kemenag). 2022. Sistem Informasi Wakaf 2022. Retrieved from <https://siwak.kemenag.go.id/>
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 2022. Nilai Impor Bahan Baku Industri Pengolahan
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2020. Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah.
- Marshella, E.T. 2023. Determinan Ekspor Indonesia ke Negara Anggota Developing Eight (D-8) dan Negara Non D-8 Tahun 2010-2020: Pendekatan Gravity Model.

- McKinsey. 2022. The State of AI. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantum-black/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Statistik IKNB Syariah Periode Desember 2018-2022. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Market Update Pasar Modal Syariah Periode Januari – Desember 2022 Statistik Saham Syariah Periode 2017-2022. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Statistik Reksadana Syariah Periode Oktober 2018-2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Statistik Perbankan Syariah September 2018-2022. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Statistik Saham Syariah Periode Desember 2018-2022. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Statistik Sukuk Syariah Periode Desember 2015-November 2022. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Default.aspx>
- Soni, V. D. (2019). Role of Artificial Intelligence in Combating Cyber Threats in Banking. *International Engineering Journal For Research & Development*, 4(1), 7-7.
- Stanko, M.A. and Henard, D.H. (2017), “Toward a better understanding of crowdfunding, openness and the consequences for innovation”, *Research Policy*, Vol. 46 No. 4, pp. 784-798.
- World Bank. 2022. Data Real dan Proyeksi GDP Amerika Serikat dan Berbagai Negara di Eropa. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- Yu, S., Johnson, S., Lai, C., Cricelli, A. and Fleming, L. (2017), “Crowdfunding and regional entrepreneurial investment: an application of the CrowdBerkeley database”, *Research Policy*, Vol. 46 No. 10, pp. 1723-1737.



SEKILAS TENTANG **PEBS FEB UI**

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2006, **PEBS FEB UI** didedikasikan untuk menjadi *center of excellence* bagi penelitian, pelatihan, konsultasi, serta pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan pembangunan secara umum sesuai kebutuhan akademik, regulator, industri, dan masyarakat.

 pebsfebui

 <https://www.linkedin.com/company/pebs-feb-ui/mycompany/>



📍 Gedung B Lt.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia
🌐 www.pebs-febui.org

